

PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP PENGHALANG  
MENDAPATKAN WARISAN DALAM KHI PASAL 173

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magister Hukum Islam (MHI)

Program Studi Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri

Sumatera Utara

Oleh :

Amru Syahputra Lubis

NIM.

91212022672



PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2014 M/ 1435 H

**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP PENGHALANG**

**MENDAPATKAN WARISAN DALAM KHI PASAL 173**

**OLEH**

**AMRU SYAHPUTRA LUBIS**  
**NIM. 91212022672**

Menyetujui :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Pagar, M. Ag**  
NIP. 195812311988031016

**Dr. Saidurrahman, M. Ag**  
NIP. 197012041997031006



NAMA : AMRU SYAHPUTRA LUBIS

NIM : 91212022672

PRODI : HUKI

JUDUL : PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN

TERHADAP PENGHALANG MENDAPATKAN

WARISAN DALAM KHI PASAL 173

### ABSTRAK

Pada dasarnya seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dia juga melakukan kejahatan kepada Allah SWT. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan taubat yang mencakup tiga syarat yaitu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Didalam Kompilasi Hukum Islam sebab seseorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan; Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berbeda dengan Fikih yang merumuskan ahli waris terhalang mendapatkan warisan yaitu perbudakan, pembunuhan, berbeda agama (murtad) dan berlainan negara. Di sini jelas berbeda antara KHI dengan Fikih dalam hal merumuskan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. dalam hal ini para Ulama khususnya berdomisili di Kota Medan berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa KHI berbeda dengan Fikih karena mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. Dan juga melihat kondisi saat ini yang harus dibuat suatu rumusan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu perlu dibuat Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan ini akan menjadi alat yang sangat membantu masyarakat Islam di Indonesia.

### Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Amru Syahputra Lubis
2. Nim : 91212022672
3. Tempat / Tgl Lahir : Binjai 27- Juli- 1980

4. Pekerjaan : Guru
5. Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 241.  
Kelurahan Kebun Lada Kecamatan  
Binjai Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173” Benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28- April- 2014  
Yang membuat pernyataan

Amru Syahputra Lubis

Tesis yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173”, an. Amru Syahputra Lubis Nim 91212022672 Prodi Hukum Islam telah di munaqasyahkan pada sidang munaqasyah program PascaSarjana IAIN- SU Medan pada tanggal, 24 – April – 2014.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada program Studi Hukum Islam.

Medan, 24 – April – 2014  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Program PascaSarjana IAIN- SU Medan

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA  
195808151985031007

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA.  
NIP. 196407821992031004

NIP.

Anggota

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. <u>Prof. Dr. H. Pagar, M. Ag</u><br>195812311988031016       | 2. <u>Dr. Saidurrahman, M. Ag</u><br>NIP. 197012041997031006    | NIP |
| 3. <u>Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA</u><br>NIP. 195808151985031007 | 4. <u>Dr. Faisar Ananda Arfa, MA</u><br>NIP. 196407021992031003 |     |

Mengetahui  
Direktur PPS IAIN- SU Medan

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA  
NIP : 195808151985031007

NAME : AMRU SYAHPUTERA LUBIS

NIM : 91212022672

DEPARTMENT : ISLAMIC LAW (HUKI)

TITLE : VIEW OF ISLAMIC SCHOLARS OF MEDAN ABOUT OBSTACLE  
TO GET HERRIT AGE IN KHI SECTION 173

#### ABSTRACT

Basically someone who committed a crime to another he committed the crime to Allah. So the first step which must be done is repentance including three terms leave the immoral deeds regret what you have done and promised not to do it again.

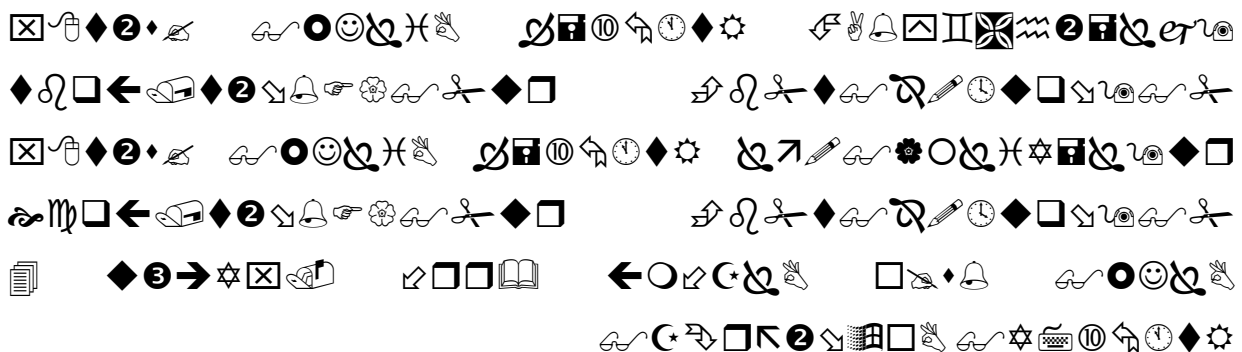
In the compilation of Islamic law blocked because someone heirs to inherit; Have been blamed for killing or attempting to kill or injure the weight of the testator; Blamed for defaming it has filed a complaint that the heir commit an offense punishable by 5 years imprisonment or more severe punishment. In contrast to the Fikih formulate heirs are deprived of inheritance of slavery, murder, a different religion (apostasy) and different countries. Here is clearly between Fikih and KHI are different from terms of formulating an unobstructed heirs to obtain inherited property of the testator. In this case, especially the scholars residing in Medan different opinions in this regard. They say that KHI is different from Fiqh because of consideration of various aspects, namely sociological, juridical and philosophical. And also look at the current condition should be made a formula that can provide a sense of justice and prosperity for the people of Indonesian Islam. Therefore, it needs to be made compilation of Islamic law in accordance with the condition of Indonesia and this will be a very helpful tool in the Indonesian Islamic community.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam menetapkan aturan dengan bentuk yang sangat teratur, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Al Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Salah satunya terdapat dalam Firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 7 :



Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (An Nisa’ : 7).<sup>1</sup>

Selain terdapat dalam ayat Al Qur'an juga terdapat Dalam Sunnah Rasulullah Saw, seperti yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم الحقوق الفرائض لإهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (متفق عليه)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), h. 117.

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Ismail al- Kahlani, *Subul Al Salam*, juz III ( t.t.: Dahlan, t.th.), h.98.

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata : “Rasulullah Saw bersabda : bagikanlah warisan- warisan itu kepada orang yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris laki- laki yang paling dekat. (Muttafaqun Alaih)”

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu hubungan perkawinan, kekerabatan (yang ada ikatan nasab) seperti kedua orang tua, anak saudara, paman, dan seterusnya, Perwalian.<sup>3</sup>

Sedangkan yang menjadi penghalang /penganggur hak waris, maksudnya keadaan yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, menurut kesepakatan fuqaha', ada tiga yaitu hamba, pembunuh dan perbedaan agama.<sup>4</sup>

Dengan maksud yang sama Imam Taqiyuddin Menjelaskan :

ومن لا يرث بحال سبعة : العبد و المدبر و ام الولد والمكاتب والقاتل و المرتد و اهل ملتين .

Artinya : “ Seseorang itu tidak menjadi mewarisi karena 7 (tujuh) keadaan :

Hamba Mutlak, hamba mudabbar, hamba ummu walad, hamba mukatab, membunuh, murtad dan berbeda agama.”<sup>5</sup>

Bila dipadukan macam- macam hamba yang terdapat di dalamnya. secara umum juga menjadi 3 (tiga) macam. :

الموانع الحقيقية اربعة : القتل والرق و إختلاف الدين والدور .

Artinya : “Secara hakikat penghalang mewarisi itu ada empat macam yaitu :

Membunuh, hamba, berbeda agama dan berbeda Negara.”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> A. Sukris sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 27.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII (t.t.: Dar Al Fikr, 1989), h. 225.

<sup>5</sup> Taqiyuddin, *Kifayat Al Akhyar*, juz II (Bandung, Indonesia: Dar Ihya Al Kutub, t.th.), h. 18.

<sup>6</sup> Muhammad al- Khatib al- Syarbaini, *Muqhi al muhtaj*, juz 3 (Beirut : Dar Al- Fikr,



Sedangkan yang berkenaan dengan pembunuhan terdapat dalam Hadis

Nabi Muhammad Saw :

و عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جد ه قال : رسول الله صلى عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء  
( رواه النسائي و الدار قطنی ) .

Artinya : Dari Amru Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya r.a. beliau berkata :

Rasulullah Saw bersabda : tidak ada sedikitpun harta warisan bagi si

Pembunuh.” ( diriwayatkan dari an- Nasai' dan Ad- Daruquthni)”.<sup>7</sup>

Dalam hal perbedaan agama, terdapat dalam Hadis :

عن أسامة بن زيد ان النبي صلى عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه )

Artinya : “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw

Bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang

Kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaun ‘alaih)”.<sup>8</sup>

Di Indonesia terutama sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam<sup>9</sup> didalamnya disebutkan secara jelas dalam pasal 173 huruf A dan B: “ Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

---

1398 H/ 1978 M), h. 26.

<sup>7</sup> Al – Kahlani, h. 101.

<sup>8</sup> Ibid., h. 98.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 26.

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”<sup>10</sup>

Pada 173 huruf A dan B, memberikan pemahaman bahwa pada si pewaris ingin dibunuh atau dianiaya oleh yang mewarisi. Dan pada saat pewaris dahulunya masih hidup, dia pernah diadukan oleh ahli warisnya kepengadilan dalam kasus pidana berat (diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari padanya) dengan tuduhan palsu, karena segala apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar adanya. Upaya yang dilakukan oleh ahli waris itu adalah fitnah belaka.

Fitnah diartikan sebagai ungkapan tanpa bukti yang dapat menimbulkan kekacauan, mengusir seseorang dari kampung halamannya, merampas harta mereka, atau mengganggu kebebasan beragama mereka.<sup>11</sup>

Dalam kamus bahasa indonesia diartikan dengan perkataan yang bermaksud menjelekkan seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pada tanggal 2 Februari 2014 penulis mewawancarai Bapak Nizar Syarif salah seorang Ulama Kota Medan dan beliau juga sebagai ketua bidang fatwa MUI kota Medan dan mantan ketua ormas Islam Al-Washliyah Sumatera Utara tentang sebab fitnah sebagai penghalang mendapatkan warisan dalam KHI. Beliau mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah bisa membunuh jiwa manusia dan juga karakternya. dan fitnah bisa merusak masyarakat serta bangsa dan negara. Karena itu para pakar Kompilasi hukum Islam merumuskan fitnah menjadi suatu penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Beliau juga mengatakan bahwa fitnah menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan karena berlandaskan pada Al Qur'an pada surah al- Baqarah ayat 191 yaitu :

---

<sup>10</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 199), h. 531.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>12</sup> W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. XIII (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1993), h. 282.



Artinya: “ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Dari ayat Al Qur'an tersebut maka fitnah termasuk perbuatan yang sangat kejam melebihi daripada pembunuhan.<sup>13</sup>

Untuk itulah penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI.**

## **B. Perumusan Masalah.**

Dengan berpedoman kepada latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Apa saja yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan dalam KHI?
2. Bagaimana perbedaan seseorang yang terhalang mewarisi dalam KHI dan Fikih?
3. Bagaimana Pandangan Ulama kota Medan terhadap penghalang mendapatkan warisan dalam KHI?

## **C. Batasan Istilah.**

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat, maka penulis membuat judul karya ilmiah berupa batasan istilah.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara Penulis Dengan Bapak Nizar Syarif Salah Seorang Ulama Kota Medan Dan Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Medan Dan Mantan Ketua PW Al- Washliyah Sumatera Utara.

- Ulama Kota Medan adalah Orang alim yang ahli dalam ilmu- ilmu syari'ah serta memahami Kompilasi Hukum Islam dan ilmu pengetahuan umum, Dimana ia gunakan untuk memahami dan menggali ilmu syari'ah
- Bunuh adalah mematikan diri sendiri, mematikan.
- Membunuh adalah mematikan diri orang lain.<sup>14</sup>
- Aniaya adalah perbuatan bengis, penyiksaan, penindasan, sadis dan sewenang-wenang.<sup>15</sup>
- Fitnah adalah Perkataan yang bermaksud menjelekkan nama orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).<sup>16</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan dalam KHI?
2. Bagaimana perbedaan seseorang yang terhalang mewarisi dalam KHI dan Fikih?
3. Bagaimana pandangan Ulama Kota Medan terhadap penghalang mendapatkan warisan dalam KHI?

#### **E. Kajian Terdahulu.**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan bahwasanya secara spesifik penulis tidak menemukan judul yang kaitannya dengan Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI tetapi penulis menemukan dan akan mengemukakan sebuah judul yang membahas tentang fitnah ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhanmad Razali yaitu: Fitnah Sebagai Penghalang Mendapatkan Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 1979), h. 50

<sup>15</sup> Ali, *Kamus*, h. 13

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 318

(Studi Kasus di Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang).<sup>17</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran.**

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dengan lingkungan peradilan agama lainnya.<sup>18</sup>

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang akan dipergunakan oleh pengadilan agama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>19</sup>

Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden no.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.<sup>20</sup>

Dalam pasal 173 huruf A dan B disebutkan bahwa penghalang bagi seseorang untuk mewarisi adalah karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5

---

<sup>17</sup> Muhammad Razali, *fitnah Sebagai Penghalang Mendapatkan Warisan. (Studi Kasus di Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi, Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2011.

<sup>18</sup> Abdul Manan, dan M Fauzan, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 388.

<sup>19</sup> Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h. 23.

<sup>20</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Risalah Perss, 1994), h. 62.

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dalam Al Qur'an kata fitnah disebutkan pada 34 tempat, dan digunakan dalam arti yang berbeda.<sup>21</sup>

Berbeda halnya dengan pengertian yang dibuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus menjadi acuan pengertian pada pasal 173 huruf A dan B, dinyatakan bahwa Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris. Dan fitnah adalah keadaan seseorang dimana dia telah dijatuhi putusan pengadilan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tuduhan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat dari padanya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan pada masa sesudahnya yang mempersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, mempersalahkan dia telah melakukan fitnah karena mengajukan pengaduan bohong yang dapat merusak diri dan nama baik seseorang dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan juga fitnah yang dipandang sebagai penghalang mewarisi atau mendapat warisan, tidaklah cukup hanya dengan sekedar fitnah itu telah terbukti sebagai berita bohong, tetapi mestilah melalui gugatan balik dari orang yang difitnah, atau ahli waris, atau orang lain yang berkepentingan, kemudian setelah diproses oleh pengadilan lalu ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Mempersalahkan orang tersebut karena telah memfitnah. Baru setelah inilah orang tersebut dapat dinyatakan terhalang mewarisi dari orang yang difitnah tadi. Dan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut menjadi bukti bahwa fitnah itu benar adanya.

## **G. Metode Penelitian.**

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah- langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

---

<sup>21</sup> *Eksikopledi Islam*, jilid 2 (Van Hoeve, Jakarta: PT. Khitan Baru, 1999), h. 19.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum islam doktrinal yang sifatnya Kualitatif Analitik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap materi hukum KHI dalam rangka untuk menentukan metode istinbat hukum apa yang dipakai dalam merumuskannya, terutama pada tiga poin yang menjadi sterasing poin penelitian.<sup>22</sup>

## **2. Sumber Data.**

Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan dan refrensi dalam penelitian ini bersumber kepada dua bagian yang penting yaitu:

- a. Data Primer, Adapun yang tergolong dalam data primer adalah buku KHI dan buku ushul Fikih dan Fikih yang merupakan rujukan utama dalam penelitian ini. Dan wawancara yang dilakukan terhadap mereka yang terlibat dalam perumusan KHI.
- b. Data Skunder, Sedangkan data yang tergolong sifatnya pendukung (data skunder) adalah buku-buku, jurnal, majalah yang mengkaji dan membahas persoalan KHI.<sup>23</sup>

## **3. Pengumpulan Data.**

---

<sup>22</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 173.

<sup>23</sup> *Ibid.*,h. 173.



Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada dua bagian:

1. Studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang mengkaji dan membahas persoalan KHI dan sebagainya.
2. Wawancara, pada bagian ini, untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara kepada mereka yang terlibat dalam perumusan KHI kendati tidak keseluruhannya tetapi mewakili para perumus KHI. Dan Juga mereka yang benar-benar memahami KHI. Serta mereka juga termasuk pengurus ormas Islam yang ada di kota Medan Ini.
3. Metode penulisan penelitian dilakukan dengan menjadikan panduan penulisan tesis Program PascaSarjana IAIN-SU sebagai acuannya.<sup>24</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan.**

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis membagikan dalam beberapa Sub Bab:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 174.

BAB II Landasan teoritis yang berisikan hal-hal yang menjadi penghalang mendapatkan warisan dalam KHI.

BAB III Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih

BAB IV Tentang Pandangan Ulama Kota Medan Mengenai Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI.

BAB V Penutup yang meliputi dari; kesimpulan dan saran- saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **Hal – hal yang Menjadi Penghalang Mendapat Warisan Dalam KHI.**

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 173 huruf A dan B

Disebutkan bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>25</sup>

#### **A. Pembunuhan.**

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. pembunuhan biasanya di latarbelakangi oleh bermacam-macam motif. Misalnya : politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom dan sebagainya.<sup>26</sup>

Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in sampai pada masa mujtahid, hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW :

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه النسائي)

---

<sup>25</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* ( Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010) h. 204.

<sup>26</sup> *Wikipedia bahasa Indonesia.*

Artinya : “ Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya”.

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewarisi, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis- jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub).

Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewarisi ,sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewarisi.<sup>27</sup> Berbeda dengan Imam Syafi’i beliau berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja menghalangi hak atas waris persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya manakala pembunuhannya seorang anak kecil atau orang gila.

Menurut Imam Malik beliau mengatakan bahwa seseorang membunuh kerabatnya sebagai qishash, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan- alasan lain yang dibenarkan syara’, maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Demikian pula halnya dengan pembunuhan tidak sengaja.<sup>28</sup>

Sementara itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman. sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran, maka orang yang membunuh seseorang sebagai qishah, untuk membela diri atau atas perintah

---

<sup>27</sup> Rachmad Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), h. 547

hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang menerima waris dari orang yang dibunuhnya.<sup>29</sup>

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “Tidaklah seseorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.” Dari pemahaman hadis ini Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur dikalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه

“Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap terhadap sesuatu yang belum masanya, menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu.<sup>30</sup>

## **B. Mencoba Membunuh**

Pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan. Yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana, dibicarakan hal percobaan. Berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur yang belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan. Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu menuju hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju. Atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai, tetapi tidak sampai selesai. Misalnya membunuh orang, telah menyerang akan tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati, bermaksud mencuri barang, tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya.<sup>31</sup>

Sama halnya dengan membunuh, seseorang mencoba membunuh sama dengan pembunuhan yang disengaja karena dia sudah berniat mencoba membunuh untuk mempercepat mendapatkan warisan. Istilah “ mencoba” membunuh ini berasal dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “*poging*” (percobaan melakukan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 548

<sup>30</sup> Abdul Mudjib, *Al- Qowa'idul Fiqhiyyah* (Yogyakarta : Nurcahaya, 1980), h. 72

<sup>31</sup> Blogspot.com *Hukum Pidana*. Html.

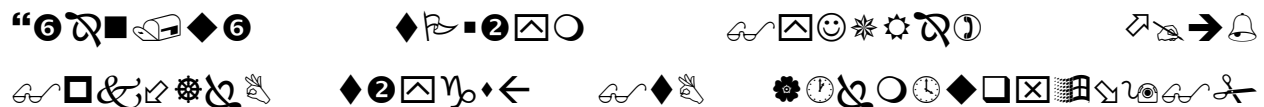
kejahatan). Pengertian ini lebih jelas terlihat dari maksud pasal 53 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Percobaan melakukan pembunuhan dapat dipidana, apabila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri. Dengan menghubungkan pengertian “percobaan” (mencoba) yang ada dalam pasal 53 KUHP tersebut kepada “membunuh” (pembunuhan), sehingga menjadi kalimat “mencoba membunuh” sebagai penghalang mewarisi yang dimaksud oleh pasal 173 KHI tersebut, maka penulis melihat hal itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh, dengan suatu sebab yang di luar kemampuannya, maka pembunuhan itu tidak dapat diselesaikannya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa orang tersebut pantas dikenai sanksi hukum tidak mewarisi sama seperti oarang yang membunuh.<sup>32</sup> Bisa jadi yang ia bunuh itu belum meninggal tetapi dia sudah melakukan suatu kejahatan yaitu mencoba membunuh, karena berniat saja untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang sudah di katakan telah melakukan dosa meskipun seseorang tadi tidak meninggal dikarenakan belum sampai ajal seseorang tadi. Tetapi dia sudah menjadi korban pembunuhan.<sup>33</sup>

### C. Menganiaya Berat.

Pengertian menganiaya adalah memperlakukan dengan sewenang-wenang. (seperti menyiksa, menyakiti). Pengertian menganiaya berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.<sup>34</sup>

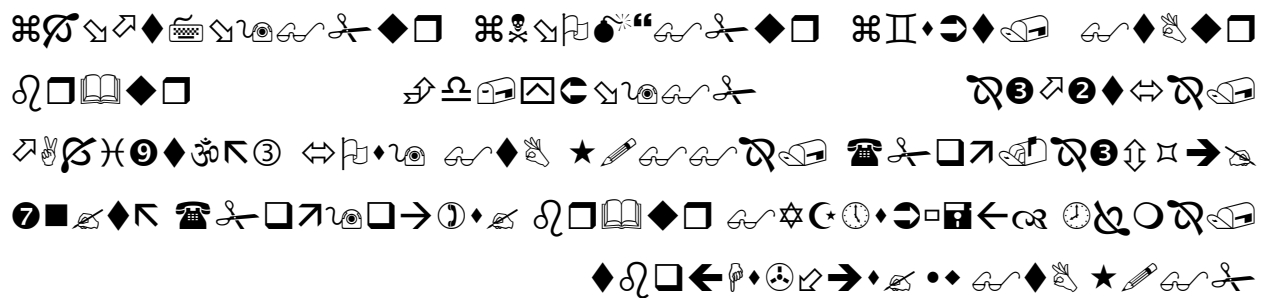
Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah al- A'raf ayat 33 :



<sup>32</sup> Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung:Citapustaka Media, 2007), h. 138.

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pagar selaku Ulama Kota Medan dan juga beliau Termasuk Ahli dalam Kompilasi Hukum Islam Serta Pengurus Ormas Islam Terbesar yaitu Nahdhatul Ulama dan menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Di kota medan

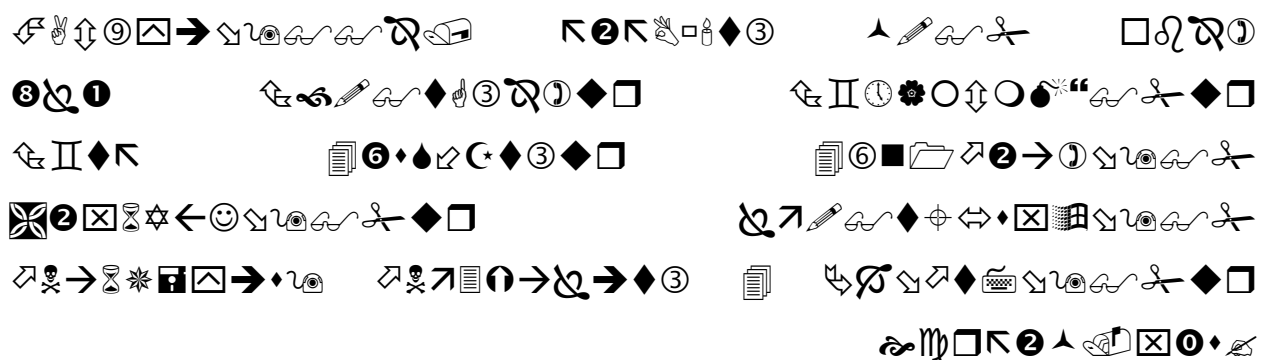
<sup>34</sup> [www.Arti.kata.com](http://www.Arti.kata.com)



Artinya : “ Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al- A'raf : 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengharamkan segala rupa dosa, baik besar maupun kecil. Segala perbuatan yang keji, segala rupa aqad yang berlawanan dengan keinginan syara', dan segala perkataan yang salah dan i'tikad yang batal. Ayat ini mengumpulkan segala yang di haramkan.<sup>35</sup>

Kemudian dalam surat an- Nahl ayat 90.



Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” ( QS. an Nahl : 90)

<sup>35</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al- Bayaan I* ( Yokyakarta, PT. Al-Maarif Bandung, 1966).

Maksud ayat ini adalah yang menjadi sumber-sumber bagi kebaikan yang menerangkan pokok-pokok kejahatan. Umar Ibn Abdul Aziz yang mula-mula menempatkan ayat ini di akhir khutbah. Sebagai ganti memaki-maki Ali yang dilakukan oleh khatib-khatib bani Umaiyah.<sup>36</sup>

Dari ayat Al Qur'an di atas jelaslah bahwasanya menganiaya atau berbuat kezaliman sangat dibenci Allah dan merupakan dosa yang besar. Dalam hal kewarisan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena dalam hal ini si ahli waris telah melakukan penganiayaan berat yang dapat berakibat si pewaris hilang nyawanya. Kalau pun tidak meninggal dunia maka akan menyebabkan cacat badan seumur hidup dan lambat laun dapat menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu di dalam KHI telah dirumuskan penghalang seseorang mendapatkan warisan termasuk menganiaya berat pewaris. karena perbuatan menganiaya adalah perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar bagi pelakunya.

#### **D. Memfitnah.**

Memfitnah berasal dari kata fitnah berarti perkataan yang bermaksud menjelekkan nama orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).<sup>37</sup> Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Dahlan mengatakan Fitnah menurut bahasa adalah ujian, dengan arti luas, antara lain:

1. Suatu tekanan dan penindasan, dinamakan fitnah karena menjadi ujian bagi keteguhan atas tekanan dan penindasan itu.
2. Suatu hukuman yang ditimpakan Allah SWT karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dinamakan fitnah karena hukuman itu merupakan ujian apakah itu membuat jera atau tidak.
3. Suatu pemberian Allah SWT yang berupa keburukan, kebaikan, senang, susah, untung, rugi kalah dan menang dan seterusnya. Itu dinamakan fitnah karena menjadi ujian apakah nikmat yang diberikan

---

<sup>36</sup> As- Shiddieqy, *Tafsir Al- Bayaan I*, h. 739.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 318



Allah SWT membuat kita bersyukur atau kesusahan yang ada pada kita membuat kita bersabar.<sup>38</sup>

Sebagaimana halnya dua hal sebelumnya (poin 3), dan 4) kajian fitnah juga tidak dikenal di dalam hukum kewarisan Islam secara tekstual, sedangkan KHI mencatumkan secara tegas sebagai penghalang mewarisi. Sikap KHI ini dipahami masih tetap mengemban ide syari'at, dimana memfitnah dikomparasikan dengan membunuh, seperti firman Allah dalam Al Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 191 dan 217, menyatakan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Mengamati fitnah sebagai penghalang mendapatkan warisan menurut KHI ini, terlihat sebagai modifikasi dari bentuk pembunuhan dikenal dalam kajian Fiqh dimasa silam. Dimana sekarang ini terlihat manusia itu semakin mampu melakukan bentuk kejahatan terselubung dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dengan tingkat keamanan dirinya yang maksimal, maka ditempuhnya cara-cara tertentu semisal fitnah. Penulis melihat bahwa hal ini perlu diantisipasi, termasuk dalam kajian hukum waris. Dengan demikian pelaku fitnah itu pantas dihukum tidak mewarisi. Sejalan dengan itu penulis berpendapat bahwa dengan mengangkat jiwa syari'at, maka ulama klasik pun dapat menyetujui fitnah sebagai penghalang mewarisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut:

- a. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Syafi'i dipahami dapat menerima fitnah sebagai penghalang mewarisi, dengan jalan pikiran sebagai berikut:

Dalam tulisan Ibn Qudamah dinyatakan;

وعن احمد رواية أخر تدل على ان القتل يمنع الميراث بكل حال, فانه قال في رواية ابنه صالح و عبد الله... وهذا يدل علي أن القتل يمنع الميراث بكل حال وهذا ظاهراً من مذهب الشافعي

Artinya : Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan segala hal maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya salih dan Abdullah ..., dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan “segala hal” adalah menghalangi pewarisan. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 318

<sup>39</sup> Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. h. 141.

Kata “بكل حال” sama dengan kata “مطلقاً” (secara mutlak), sifatnya umum, dan pengertian ini mencakup; “keadaan” dan “cara”. Karenanya, di pahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan tetap bersanksi tidak mewarisi dari orang yang dibunuh. Dan ini termasuk dalam keadaan; sengaja, atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, atau yang lainnya. Demikian juga dengan “cara”, maka dengan cara bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan juga tetap dihukum tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, misalnya saja dengan cara langsung, atau tidak langsung (untuk hal ini termasuk dengan cara memfitnah), dengan cara memenggal leher sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul, mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara perlahan-lahan, serta agak tertunda. Semua bentuk pembunuhan tersebut dinyatakan tidak mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara memfitnah, karenanya orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari orang yang memfitnahnya.

- b. al-Baihaqi juga dipahami dapat menerima pendapat bahwa fitnah itu adalah salah satu penghalang mewarisi. Kesimpulan seperti ini diambil dari analisis sebagai berikut:

وقد شاقا البيهقي في آثاره عن عمر و ابن عباس و غيرهما تفيد كلها انه لا ميراث للقتل مطلقاً

Artinya : Dan sesungguhnya telah dikemukakan oleh al-Baihaqi pada bahasan beberapa atsar dari Umar dan Ibn Abbas dan yang lainnya, ternyata semua memberi pemahaman bahwa tidak ada harta warisan bagi orang yang membunuh “secara mutlak”.<sup>40</sup>

- c. Banyak dari ulama mengatakan bahwa pembunuhan yang dinyatakan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang tersimpan di dalam niat, yaitu keinginan untuk mempercepat perolehan warisan. Hal ini terlihat dari uraian berikut:

Imam al- Nawawi mengatakan;

ومنهم من قال لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح لما روي ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئاً و لأن القتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة الى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 142.

Artinya: Dan dari mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh dengan segala cara macam keadaan dan cara itu tidak mewarisi, dan inilah pendapat yang sah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA. Bahwa Rasul Saw bersabda; “Orang yang membunuh tidak mendapat warisan meskipun sedikit”. Dan sesungguhnya orang yang membunuh itu dicegah mewarisi sehingga tidak terbuka jalan untuk mempercepat perolehan harta warisan, maka wajiblah mencegahnya terhadap pembunuh dengan segala macam situasi dan cara pembunuhan, untuk menutup kesempatan.<sup>41</sup>

Wahbah al-Rakhili mengatakan;

اتفق الفقهاء على ان القتل ما نع من الميراث فا لقا تل لا يرث من قتيله لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس لقا تل ميراث لأنه استعجل الميراث قبل أوانه بفعل محظور فعقب بحرمانه مما قصد ولأ ن التوريث مع القتل يؤدي الى الفساد .

Artinya: Fuqaha sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah pewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadis Rasul Saw yang mengatakan; “Orang yang membunuh tidak mewarisi”. Berhubung ada upaya untuk memperoleh harta warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dihukum dengan tidak mewarisi; sejalan dengan adanya maksud tertentu. Berhubung perwarisan yang terjadi dengan sebab adanya pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan kerusakan.

Kata ; “بفعل محظور” (dengan cara yang dilarang) dalam kutipan tersebut adalah bersifat umum, maka membunuh dengan cara memfitnah itu termasuk perbuatan yang dilarang, maka hal itu masuk di dalamnya. Dengan demikian pantas untuk menempatkan sebagai orang yang terhalang mewarisi.

Meskipun tidak menyatakan bahwa fitnah termasuk menghalangi pewarisan, namun dengan analisis dikemukakan diatas, penulis melihat bahwa hal itu dapat diberlakukan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 143.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 144.

Fitnah adalah penyakit hati yang memakan kebaikan mendatangkan keburukan serta membuang-buang waktu secara sia-sia. Penyakit ini meluas di masyarakat karena kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan yang semakin mudah dan banyaknya waktu luang. Kemajuan teknologi informasi misalnya juga turut menyebarkan penyakit masyarakat ini.

Didalam Al Qur'an kata fitnah mengandung beberapa makna yaitu:

Terkadang fitnah adalah kekafiran atau kemusyrikan, seperti dalam Firman Allah Ta'ala :

☞ ➦ ⬅️ 🔍 📄 🗂️ 📁 📂 📃 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📻 📼 📽 📾 📿 📻 📼 📽 📾 📿

<sup>44</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 170.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al- Baqarah: 217)<sup>45</sup>

[illegible]

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Gema Risalah, 1992), h.

semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

(al-Baqarah:193)<sup>46</sup>

Dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan kata Fitnah dalam ayat ini adalah berasal dari kata *fatina sh-shaighu dz-Dzahaba* yang artinya : apabila tukang emas melebur emasnya dengan api untuk mengeluarkan kotorannya, kemudian dipakai dalam pengertian setiap ujian yang berat, seperti diusir dari kampung halaman yang tercinta atau fitnah dalam masalah agama.<sup>47</sup>

Pada ayat-ayat yang lalu telah menuturkan masalah-masalah yang *hilal* dan waktu bagi umat manusia dalam melaksanakan ibadah dan mu’amalah mereka, terutama sekali dalam masalah haji, yang pada masa jahiliyah dibulan ini mengharamkan pertempuran. Dalam bulan tersebut, apabila bertujuan untuk membela agama Allah dan memberi pelajaran kepada musuh yang telah memfitnah dan merusak janji. Jadi bukan semata-mata kerana dorongan hawa nafsu atau ingin memperoleh ghanimah atau ingin mengalirkan darah.<sup>48</sup>

Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan tatkala beliau memasuki majidil Haram beliau telah dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Namun, kemudian mengajak berdamai dengan beliau yang akhirnya ditetapkan bahwa beliau boleh melakukan haji pada tahun depan. Pada saat itu kota Mekah dibebaskan untuk kaum Muslimin selama tiga hari untuk melakukan tawaf adan berbuat sesuka hati mereka. Tatkala Rasulullah beserta para sahabat bersiap-siap hendak melakukan ibadah *Umrah Qhadha*, hati mereka telah diliputi oleh perasaan khawatir dan takut terhadap orang-orang Quraisy apabila mereka tidak menepati janji, menghalang-halangi dan memerangi mereka pada kesempatan ini. Padahal para sahabat tidak suka mengadakan peperangan dikota mekah dan dibulan muharram, sehingga turunlah ayat ini.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>47</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 2 (Semarang: CV. Toha Putra, 1984), h. 164.

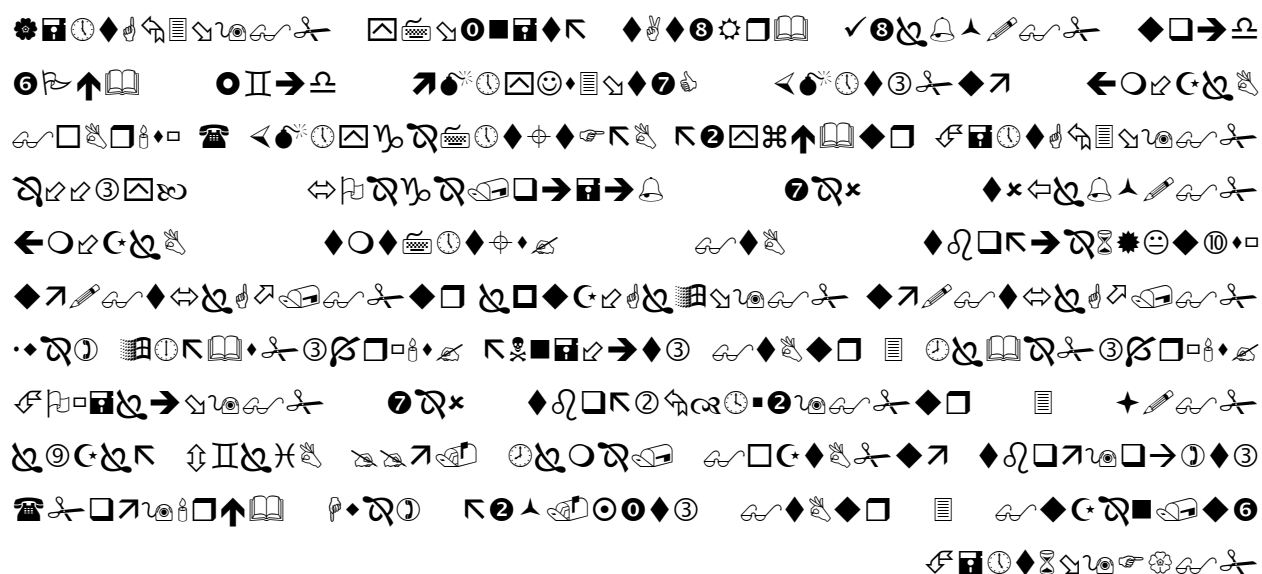
<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 165.

Kata fitnah disini menurut para ulama ahli tafsir adalah 'kekafiran atau 'kemusyrikan'.<sup>50</sup>

Yakni bahwa mereka itu menyebarkan kekafiran. Sementara sebagian kaum muslimin karena belum diberitahu oleh Nabi Muhammad Saw, melakukan kekeliruan dengan memerangi kaum musyrik dibulan suci. Perbuatan mereka itu keliru. Dalam arti tidak pantas. Tapi kekafiran kaum musyrik itu lebih besar bahayanya daripada kekeliruan berperang di bulan suci. Itulah makna yang jelas dari ayat tersebut.

### 3. Fitnah Bermakna Konflik



Artinya: “Dia-lah yang menurunkan kitab Al Quran kepada kamu.

di antara isi nya ada ayat-ayat yang muhkamat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi

<sup>50</sup> Jalal ad-Din as Suyuti, *Al Asybah wa an Naza'ir fi al- Furu'*, cet. I (Syirkah Nur asy Syaqaqah Islamiyah, 1965), h. 167.

Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal."

(QS. al-Imran: 7)

Ada diantara sebagian orang Islam yang mendewakan rasio, dimana mereka gemar mencari penafsiran ayat melalui logika, sehingga melenceng dari tafsir yang sesungguhnya. Tujuan mereka semata-mata menyebar fitnah, yakni mencari konflik dan perselisihan dengan sesama muslim.

#### 4. Fitnah Bermakna Kedustaan (Kericuhan)

﴿فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ﴾<sup>51</sup>

Artinya: "Kemudian Tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan: "Demi Allah,

Tuhan Kami, Tiadalah Kami mempersekutukan Allah". (al- An'am: 23).<sup>51</sup>

Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ucapan mereka yang berlumur kedustaan, untuk membela diri mereka dihadapan Allah. Padahal Allah mengetahui hakikat mereka. Dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka.

#### 5. Fitnah Bermakna Kebinasaan

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ﴾<sup>52</sup>

Artinya: "Di antara mereka ada orang yang berkata: "Berilah saya keizinan

(tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.

---

<sup>51</sup> Ibid., h. 169.



Yakni bahwa kaum munafik di masa Nabi Saw akan membawa kepada kebinasaan semata. Padahal sesungguhnya mereka sudah berada dalam kebinasaan itu sendiri. Yakni dalam kemunafikan, yang akan membinasakan diri mereka di akhirat dalam kerak neraka jahanam.

[illegible]

Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan Kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim,” (Yunus: 85)<sup>53</sup>

## 7. Fitnah Bermakna Gangguan

<sup>54</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz I, cet. I (Mesir : Mustafa al- Babi al- Halabi, 1952), h. 190.

“Dan di antara manusia ada orang yang berkata: "Kami beriman kepada Allah", Maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya Kami adalah besertamu". Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia?” (al- Ankabut: 10)<sup>55</sup>

Dari beberapa makna dalam Al Qur'an fitnah atau memfitnah adalah perbuatan yang sangat tercela dan mendapat kemurkaan disisi Allah SWT. Akibat dari fitnah ini adalah dapat menghancurkan seseorang baik nama dan juga kehormatannya. Tak cukup itu saja fitnah dapat membuat seseorang kehilangan nyawanya. Oleh karena itu tidak mengherankan, apabila Al Qur'an melukiskannya dalam bentuk tersendiri yang cukup dapat menggetarkan hati dan menumbuhkan perasaan yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam Firman Allah:



“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (al- Hujuraat: 12)<sup>56</sup>

Adapun bentuk-bentuk dan akibat fitnah antara lain:<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 251.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 321.

<sup>57</sup> Zakiah Drajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam, Ruhama, 1993), h. 87.

1. Fitnah dalam agama. Seperti kata-katamu pada sesama muslim: Dia itu fasiq atau fajir (suka berbuat dosa), penghianat, zalim melalaikan salat, meremehkan terhadap najis, tidak bersih kalau bersuci, tidak memberikan zakat pada semestinya, suka meng-Fitnah dan sebagainya.
2. Fitnah fisik. Seperti kata-katamu pada sesama muslim: Dia itu buta, tuli, bisu, lidahnya pelat/cadel, pendek, jangkung, hitam, gendut, ceking dan sebagainya.
3. Fitnah duniawi. Seperti kata-katamu pada sesama muslim: Dia itu kurang ajar, suka meremehkan orang lain, tukang makan, tukang tidur, banyak omong, sering tidur bukan pada waktunya, duduk bukan pada tempatnya, dan sebagainya.
4. Fitnah Keluarganya. Seperti kata-katamu pada sesama muslim: Dia itu Bapaknya Fasik, cina tukang batu dan lain-lain.
5. Fitnah Karakter. Seperti kata-katamu pada sesama muslim: Dia itu buruk akhlaknya, sombong, pendiam, terburu-buru, lemah, lemah hatinya, sembrono, dan lain-lain.
6. Fitnah pakaian. Kedodoran bajunya, kepanjangan ketat, melewati mata kaki, kucel/dekil, dan sebagainya.
7. Prasangka Buruk Tanpa Alasan. Prasangka buruk merupakan fitnah hati.

Nilai-nilai moral yang diajarkan Islam untuk semesta alam ini sangat mulia. Namun demikian nilai-nilai moral ini sering diabaikan begitu saja. Hanya karena dibakar kedengkian seseorang tega memfitnah saudaranya. Sehingga terjadi pertengkaran dan boleh jadi diakhiri dengan perceraian dan pembunuhan. Kadang hanya karena ambisi untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi orang tega memfitnah atasannya sehingga menghancurkan karirnya. Taktik busuk menebarkan fitnah untuk kepentingan pribadi atau golongan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang Islam harus berlaku waspada. Waspada untuk tidak berbuat fitnah dan waspada dalam menghadapi fitnah dari pihak lain.

Kadang terjadi hanya sekedar untuk mendapatkan berita eksklusif seorang wartawan tega memfitnah, mereka tidak menyadari akibat buruk yang akan terjadi karena fitnah tersebut. Sering di luar dugaan, bahkan di luar kontrol. Sayang masih saja ada orang yang senang menari-nari di atas kesusahan orang lain karena fitnahnya. Padahal masih banyak bahan berita yang bisa diangkat dan mendatangkan

berkah bagi banyak orang. Sebagai bangsa yang berakhlak kita harus mendahulukan berita-berita yang mendatangkan berkah bagi banyak orang daripada yang menyebabkan terjadinya musibah.

Kalau kita pikirkan lebih dalam dampak buruknya dapat menghancurkan rumah tangga, organisasi dan perusahaan, bahkan dapat menghancurkan sebuah negara sekalipun.

Hidup di dunia ini hanya sebentar, sedang kehidupan akhiratlah yang kekal. Jangan sampai karena kesalahan yang sepele, yang mestinya kita dapat menghindari, akhirnya menyebabkan kita masuk kedalam siksa neraka selama-lamanya. Untuk itu mari kita sama-sama kendalikan lidah kita supaya tidak menebarkan fitnah dan upaya tidak saling membantu dalam fitnah.

Rasulullah Saw memperingatkan: *Inna aktsara khathaya ibni adama fi lisanihi* (Sesungguhnya kebanyakan dosa anak adam berada pada lidahnya.) (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>58</sup>

Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengendalikan lidah kita demi keselamatan dunia dan akhirat.

Berbicara tentang kejelekan orang lain dan mencelanya disebut menggunjing jika benar, dan disebut fitnah jika tidak benar. Tentu saja, tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Orang bijak mengatakan, manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Dengan begitu, manusia itu tidak sempurna, ia bisa berbuat khilaf.

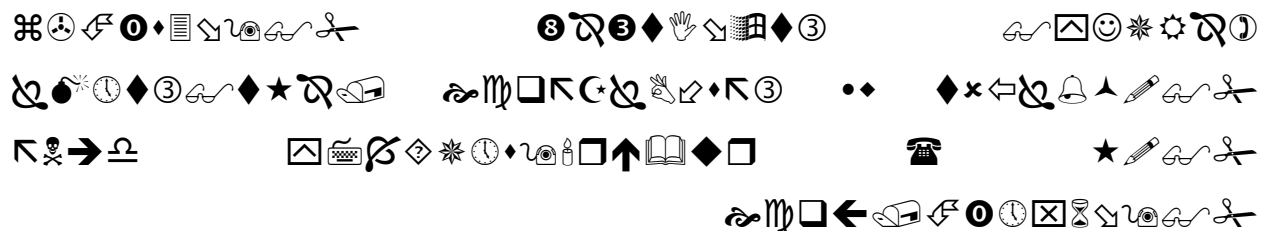
Manusia pada umumnya hidup dibalik tabir, yang oleh Tuhan dengan Kebijakan-Nya digunakan untuk menutupi perbuatan-perbuatannya. Kalau saja tabir ilahi ini diangkat untuk memperlihatkan semua kesalahan dan kekeliruan kita, niscaya semua orang akan lari dengan rasa jijik dan masyarakat akan runtuh hingga kedasar-dasarnya.

Itulah sebabnya mengapa Allah melarang kita membicarakan kejelekan orang lain. Maksudnya agar kita terlindung dari pembicaraan orang lain mengenai diri kita. Dengan wujud dan kelemahan manusia itulah, agama kemudian melarang kita untuk saling menggunjing, apalagi memfitnah. Banyak ayat suci Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw yang mencela keras segala bentuk fitnah. Yang justru akhir-akhir ini makin merebak di tanah air.

---

<sup>58</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz I, (Bandung : Dahlan 1986), h. 251.

Allah SWT berfirman :



Artinya: “

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.” (QS. al-Nahl: 105).

Tidak dapat di mungkiri bahwa dampak dari fitnah buka saja terhadap mereka yang di fitnah, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Di tanah air kita sendiri sering kali terjadi keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah dan adu domba. Begitu besarnya bahaya dan dosa fitnah sehingga oleh islam dikategorikan sebagai perbuatan lebih kejam dari pembunuhan.

Bahkan Nabi Muhammad saw lebih mempertegasnya lagi dengan sabdanya: “Tidak akan masuk surga orang yang menghambur-hamburkan fitnah (suka mengadu domba).” (HR Abu Dawud dan at- Turmuzi).<sup>59</sup>

Menurut Islam, perilaku dan tindakan di dalam kehidupan merupakan salah satu fenomena akidahnya.

---

<sup>59</sup> Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, Juz III, (Beirut: Lebanon: Muassasah ar- Risalah, t.th.), h. 41.

Untuk itu kita diminta berpegang teguh pada akidah yang telah ditetapkan dan digariskan agama. Para ulama mengatakan , kalau akidah kita baik, maka akan baik dan lurus pula perilaku kita, dan apabila akidah kita rusak, maka rusak pula perilaku kita. Oleh karena itu, maka akidah tauhid dan iman adalah penting dan dibutuhkan oleh manusia untuk menyempurnakan pribadinya dan mewujudkan kemanusiannya dihadapan Tuhan-Nya.

Adalah ajakan kepada akidah ini merupakan hal pertama yang dilakukan Rasulullah agar menjadi batu pertama dalam bangunan umat Islam. Hal ini , karena kekokohan akidah ini di dalam jiwa manusia akan mengangkatnya dari materialisme yang rendah dan mengarahkannya kepada kebaikan keluhuran, kesucian, dan kemuliaan.

Apabila akidah telah berkuasa, maka ia akan melahirkan keutamaan-keutamaan manusia yang tinggi, seperti keberanian, kedermawanan, kebajikan, ketenteraman, dan pengorbanan. Orang yang berpegang pada akidah tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada fitnah. Karena dengan akidahnya itu, ia tidak ingin tergelincir pada jurang kedosaan yang dikutuk agama.

Kita sering mendengar kata “Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan”. Namun rupanya tidak banyak yang tahu darimana istilah ini bersal, dan apa makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Pokoknya asal pakai saja. Dan mengaku-ngaku itu ajaran Islam, karena kalimat tersebut ‘kelihatannya berasal dari Al- Qur’an.

Dalam bahasa sehari-hari kata ‘fitnah’ diartikan sebagai penisbatan atau tuduhan suatu perbuatan kepada orang lain. Dimana sebenarnya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Maka perilaku tersebut disebut memfitnah.

Di dalam Al Qur’an surat al- Baqarah (2) ayat 191:



Artinya: “Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan..”<sup>60</sup>

Halim mansur mengartikan “Fitnah” ini dengan makna “Syirik” jadi syirik itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan.<sup>61</sup>

Ayat tersebut berkaitan dengan haramnya membunuh di masjidil haram, namun hal tersebut diizinkan bagi Rasulullah saw manakala beliau memerangi kemusyrikan disana. Sebagaimana diketahui di Baitullah saat Rasulullah saw diutus terdapat ratusan berhala besar dan kecil. Rasulullah diutus untuk menghancurkan semuanya itu. Puncaknya adalah saat Fathul Makkah, dimana Rasulullah saw mengerahkan seluruh pasukan muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik yang ada di makkah.<sup>62</sup>

Kemudian juga pada surat al-Baqarah (2) ayat 217 :



Artinya : “Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh..”

Ayat ini turun ketika ada seorang musyrik yang dibunuh oleh muslimin dibulan haram, yakni bulan Rajab. Muslimin menyangka saat itu masih bulan Jumadil Akhir. Sebagaimana diketahui, adalah haram atau dilarang seseorang itu membunuh dan berperanag dibulan haram. Yakni bulan Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah dan Muharram. Melihat salah satu kawan meraka dibunuh, kaum musyrikin memprotes dan mendakwakan bahwa Muhammad telah menodai bulan haram. Maka turunlah ayat yang menjelaskan bahwa kemusyrikan dan kekafiran penduduk makkah yang menyebabkan mereka mengusir dan menghalangi kaum muslimin untuk beribadah di

---

<sup>60</sup> Deprtemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 178.

<sup>61</sup> Abd al-Halim Mansur, *al- Mu'jam al- Wasit*, Juz I, Cet II (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1972), h. 31.

<sup>62</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Abd ar- Rahman al- Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, Penerjemah Rosihan Anwar (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 72.

Baitullah itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang beriman.<sup>63</sup>

Tak ada satu ayat dalam Al Qur'an yang mengartikan kata fitnah dengan arti sebagaimana yang di fahami oleh orang indonesia. Yakni menuduhkan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang dituduh. Kata fitnah di dalam Al Qur'an memang mengandung makna yang beragam sesuai konteks kalimatnya. Ada yang bermakna bala bencana, ujian, cobaan, musibah, kemusyrikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Maka memaknai kata fitnah haruslah difahami secara keseluruhan dari latar belakang turunnya ayat dan konteks kalimat dengan memperhatikan pemahaman ulama tafsir terhadap kata tersebut. Meamaknai kata-kata di dalam Al Qur'an dengan memenggalnya menjadi pengertian yang sepotong-sepotong serta meninggalkan makna keseluruhan ayat, hanya akan mengasikkan pemahaman yang melenceng dan keliru akan isi kitabullah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyalahgunakan kitabullah demi mengesahkan segala perilakunya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyelewengkan makna Al Qur'an dari pengertian yang sebenarnya.

Fitnah tidak terbatas dengan lisan saja namun juga bisa terjadi dengan tulisan atau isyarat seperti kerdipan mata, gerakan tangan cibiran bibir dan sebagainya. Sebab intinya adalah memberitahukan kekurangan seseorang pada orang lain.

Pada dasarnya orang yang melakukan fitnah telah melakukan dua kejahatan; kejahatan kepada Allah Ta'ala karena melakukukan perbuatan yang jelas dilarang olehNya, dan kejahatan terhadap hak manusia. Maka langkah pertama yang harus diambil untuk menghindari maksiat ini adalah dengan taubat yang mencakup tiga syaratnya yaitu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Selanjutnya harus diikuti dengan langkah yang kedua untuk menebus kejahatannya atas hak manusia yaitu dengan mendatangi orang yang digunjingkannya kemudian minta maaf atas perbuatannya dan menunjukkan penyesalannya. Ini dilakukan bila orang yang dibicarakannya mengetahui bahwa ia telah dibicarakan. Namun apabila ia belum

---

<sup>63</sup> Al-Mubarak Fury, Syaekh Shafiyyur Rahman, "*Sirah An- Nabawiyah*", (terj.) Kathur Suhadi, cet IX (Jakarta : Al- Kautsar, 2000), h. 176.



mengetahuinya maka bagi yang melakukan fitnah atasnya hendaknya mendoakan dengan kebaikan dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya.

Kiat menghindari fitnah dan mengobati kebiasaan fitnah yang merupakan penyakit yang sulit dideteksi dan sulit diobati ini ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan:<sup>64</sup>

1. Selalu mengingat bahwa perbuatan fitnah adalah penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah serta turunnya azab dariNya.
2. Bahwasanya timbangan kebaikan pelaku fitnah akan pindah kepada orang yang digunjingkannya. Jika ia tidak mempunyai kebaikan sama sekali maka diambilkan dari timbangan kejahatannya. Jika mengingat hal ini selalu niscaya seseorang akan berfikir seribu kali untuk melakukan perbuatan fitnah.
3. Hendaknya orang yang melakukan fitnah mengingat dulu fitnah dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. Dengan demikian akan timbul perasaan malu pada diri sendiri bila membuka fitnah orang lain sementara dirinya sendiri masih mempunyai fitnah.
4. Jika fitnah orang yang hendak digunjingkan tidak ada pada dirinya sendiri hendaknya ia segera bersyukur kepada Allah karena Dia telah menghidarkannya dari fitnah tersebut bukannya malah mengotori dirinya dengan bahaya yang lebih besar yang berupa perbuatan fitnah.
5. Selalu ingat bila ia membicarakan saudaranya maka ia seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri sebagaimana yang difirmankan Allah “Dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?”
6. Hukumnya wajib mengingatkan orang yang sedang melakukan fitnah bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram dan dimurkai Allah.
7. Selalu mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang fitnah dan menjaga lisan agar tidak terjadi fitnah.

---

<sup>64</sup> Gulen, M. Fethullah, *Versi Terdalam Kehidupan Rasulullah Muhammad Saw* (Jakarta : Raja Grafindo 2002), h. 98.

Fitnah juga bisa dikatakan keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada dihadapannya. Ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini salah satu bentuk daripada penghancuran. Sebab pengumpatan ini berarti melawan orang yang tidak berdaya. Fitnah disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang lidahnya selamat dari cela dan cerca.

### **BAB III**

## **PERBEDAAN SESEORANG YANG TERHALANG MENDAPATKAN WARISAN DALAM KHI DAN FIKIH**

### **A. Perbedaan Seseorang Yang Terhalang mendapatkan Warisan Dalam KHI**

Didalam Kompilasi Hukum Islam di nyatakan bahwa penghalang seseorang mendapatkan warisan ada dua hal yaitu pada pasal 173 poin A dan B. Adapun bunyinya sebagai berikut : “ Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diacam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat,”<sup>65</sup>

Akan tetapi pada pasal 171 huruf C, secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi. Disini terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih. Dalam kompilasi Hukum Islam hanya mencantumkan dua saja, akan tetapi dalam Fikih mencantumkan empat hal yang dapat menghalangi seorang mendapatkan warisan. Dari sini timbul permasalahan mengapa Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Fikih sedang kita ketahui Kompilasi hukum Islam merujuk kepada kitab-kitab Fikih. Oleh karena itu penulis akan mencoba memaparkan permasalahan yang terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih didalam penulisan tesis ini. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ahli hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an, tidak hanya dirtikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta jagat raya ini.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademiko Pressindo, 1992), h. 6.

<sup>66</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. I (Jakarta: dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 2.

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas tentang perbedaan agama termasuk penghalang mewarisi seperti dikemukakan Fikih pada umumnya, penulis melihat bahwa orang yang berbeda agama itu menurut KHI tetap tidak saling mewarisi. Pemahaman seperti ini terlihat dari kelompok ahli waris yang oleh KHI dinyatakan hanya orang Islam. Dengan demikian orang yang tidak Islam tidak mempunyai hubungan pewarisan dengan orang Islam. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas, atau pengakuan atau amalan, atau kesaksian, sedang bagi bayi yang baru lahir, atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Berangkat dari pemahaman dua pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa ahli waris pengganti tidak dapat mewarisi.<sup>67</sup>

Istilah Hukum Kewarisan Islam ini mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Istilah Hukum Kewarisan Islam kiranya didukung oleh banyak pihak sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dimaksud, sebagai suatu karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum lain.

Hukum Kewarisan Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar, karena persoalan harta warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya.

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>68</sup>

Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Ijbari. Yang dimaksud dengan prinsip ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.<sup>69</sup> Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya prinsip ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia

---

<sup>67</sup> Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, h. 137.

<sup>68</sup> Muslim Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin 1989), h. 18.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

kepada ahli warisnya. Berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

- b. Prinsip Individual. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan yang dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ada perbedaan mencolok, jika prinsip individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni prinsip Kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun –temurun diperoleh dari nenek moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerima secara utuh.<sup>70</sup>
- c. Prinsip Bilateral. Yang dimaksud dengan prinsip bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi dan baik dalam garis lurus kebawah, keatas serta garis kesamping, Prinsip bilateral tetap berlaku.<sup>71</sup>
- d. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian. Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.
- e. Prinsip Keadilan Berimbang

---

<sup>70</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1981), h. 121.

<sup>71</sup> Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1999), h. 5.

Prinsip ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh sipewaris. Seperti yang terungkap dalam surah an-Nisa' ayat 7 dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.<sup>72</sup>

f. Prinsip Kewarisan Akibat Kematian

Prinsip ini menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.<sup>73</sup>

g. Prinsip Personalitas ke-Islaman

Prinsip ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi bila antara dan ahli waris sama-sama menganut agama Islam. Logika yang ada disini dapat dikemukakan, bahwa persoalan kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris disebabkan oleh adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong diantara keduanya. Sehingga jika diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasai, dan mengalihkannya sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian diantara mereka menurut hukum tidak ada.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* ( Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 37.

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 38.

<sup>74</sup> Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, h. 39.



terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena ada ibu, dan seterusnya.

Adapun Hujub Nuqshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan mempunyai keturunan (anak).

Demikian juga seperti penghalang bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya. Satu hal yang perlu diketahui disini, dalam dunia faraid apabila kata hujub disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah hujub hirman. Ini merupakan haka mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian hujub nuqshan.

Pada prinsipnya seseorang yang terhibab (secara hirman) oleh oran-orang yang menghubungkan nasabnya kepada pewaris; seperti anak menghibab cucu, karena anak menghubungkan nasab cucu kepada pewaris. namun dikalangan ulama tidak dibicarakan perbedaan anak antara anak sebagai suatu tingkat kerabat yang berada diatas cucu dengan anak yang sebagai penghubung antara cucu dengan kakek (pewaris). Akibat tidak adanya pembedaan ini kelihatannya ulama sudah sepakat bahwa seorang (laki-laki) yang menjadi anak bagi si kakek menutup kemungkinan seorang yang menjadi cucu si kakek. Dengan demikian cucu terhibab oleh saudara laki-laki ayahnya. Tampaknya para ulama berpegang pada prinsip “orang yang dekat menghibab orang yang jauh”.<sup>75</sup>

Bahasan selanjutnya adalah apakah orang-orang yang terhibab itu masih mempunyai kedudukan yang kuat untuk menghibab orang lain atau tidak. Contohnya dalam kasus ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa saudara. Dengan keberadaan ayah, saudara-saudara terhibab dari hak kewarisan secara hirman.

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* ( Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 94).





yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Atau mudabbar (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal). Alhasil semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

## **b. Pembunuhan**

Para ulama Fikih sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in samapi pada masa mujtahid, hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia telah berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad yang artinya : “Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi”. (H.R. Al- Tirmizi).

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang mendapatkan warisan, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah ) dan pembunuhan tidak langsung (tasbbub).

Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewarisi.<sup>77</sup>

Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, misalnya seseorang membunuh

---

<sup>77</sup> Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 12.

dengan alat yang biasa untuk membunuh. Baik itu dilakukan dengan melukai, misalnya otak, mata, lambung, saluran kencing laki-laki, kantong kencing, daerah antara biji pelir dengan dubur, ataupun tidak dengan melukai, misalnya melaparkan orang atau menyihir.<sup>78</sup> Dalam hal ini si pembunuh wajib dikenakan hukuman qishash, yakni hukuman mati sebagai balasan, tetapi jika ahli waris memaafkannya maka wajib membayar denda berat yang diambil dari harta si pembunuh. Kemudian pembunuhan yang serupa sengaja ialah seseorang melempar ayam, kucing dengan batu dengan maksud tidak untuk membunuh, tetapi batu itu kebetulan mengenai seseorang hingga orang itu mati, dalam hal ini si pembunuh tidak dikenakan hukuman qishash, tetapi wajib membayar denda ringan yang diberi tempo selama 3 tahun.

Kemudian pembunuhan yang tidak dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu, tetapi kebetulan hal tersebut berakibat menghilangkan nyawa seseorang, maka hal ini si pembunuh tidak diqishash dan tidak dikenakan denda. Sedangkan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja adalah seseorang yang terbunuh dengan alat yang biasa tidak dipakai untuk membunuh, lalu orang tersebut meninggal dunia, maka dalam hal ini si pembunuh tidak dihukum qishash akan tetapi wajib membayar denda berat yang diberi tempo selama 3 tahun.<sup>79</sup>

Hukuman untuk kesalahan membunuh dan mencederakan orang lain dalam undang-undang Islam boleh sama ada hukuman qishash (hukum balas) atau pembayaran diyah (ganti rugi). Qishash sendiri dibahagikan kepada dua kategori: qishash untuk pembunuhan dan qishash untuk luka atau cedera. Biasanya istilah qishash digunakan untuk kesalahan membunuh dan istilah qawad untuk kesalahan mencederakan orang lain. Istilah diyah pula biasanya digunakan untuk merujuk kepada ganti rugi untuk kesalahan mencederakan orang.<sup>80</sup>

Kemudian menurut ulama mazhab Maliki pembunuhan yang dapat menyebabkan terhalangnya mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang disengaja, tetapi pembunuhan yang tidak disengaja misalnya untuk mempertahankan diri, atau

---

<sup>78</sup> Aliy As'ad, *Fathul Muin* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 254.

<sup>79</sup> Siradjuddin Abbas, *Kitab Fikih Ringkas* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983), h. 146-147.

<sup>80</sup> Mohamed S. El- Awa, *Hukuman Dalam Undang-Undang Islam* (Kuala Lumpur, 1999), h. 105.

karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan yang dibenarkan syara' maka pembunuhan ini tidak menghalangi seseorang mendapatkan warisan.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'i pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang tidak sengaja, dan pembunuhan yang disengaja, demikian pula manakala pembunuhan yang dilakukan seorang anak kecil atau orang gila. Sementara itu menurut ulama mazhab Hanbali adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran, maka orang yang membunuh seorang sebagai qishash, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang, menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu.<sup>82</sup>

### **c. Berbeda Agama**

Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang Islam dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara keduanya tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw : Artinya : “ Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. (HR. Al- Bukhari dan Muslim).

Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam agama Islam, menurut kesepakatan para fuqaha, bukan merupakan penghalang untuk mendapatkan warisan, karena itu tetap sesama muslim. Di sini masalah yang timbul adalah kewarisan Antar- iman yaitu istilah yang digunakan untuk mengacu kepada kejadian dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kewarisan berasal dari latar belakang yang berlainaan. Dalam

---

<sup>81</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), h. 547.

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 548.

kasus-kasus seperti ini, pewaris semasa hidup menganut agama yang berbeda dari yang dianut oleh salah satu atau lebih ahli warisnya. Persoalan muncul terutama ketika pihak yang meninggal beragama Islam dan ingin menerapkan prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan tanpa mempertimbangkan bahwa ada salah seorang atau seluruh ahli warisnya yang tidak menganut agama Islam. Dalam kasus seperti ini, ahli waris yang tidak beragama Islam biasanya menderita kerugian karena jika yang diterapkan adalah hukum waris Islam. Maka mereka tidak akan memperoleh jatah harta warisan. Problemnya adalah ketika non- Muslim yang mengikuti hukum waris lain, seperti hukum waris adat, atau *Burgelijk Wetboek*, tidak mau kehilangan jatahnya sementara karena perbedaan agama tersebut, terlebih ketika sistem hukum yang dianutnya (yang juga diakui oleh negara) justru mengajarkan sebaliknya. Dari sudut hukum, persoalan dalam kasus ini bukan semata karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya.<sup>83</sup>

Sudah barang tentu ada perbedaan regulasi dalam hukum Islam akibat perbedaan hukum atau keyakinan yang dianut oleh para ahli waris. Dalam hukum waris Islam, agama adalah salah satu syarat paling penting agar harta kekayaan bisa dialihkan kepada ahli waris. Ini berarti agama yang dianut pewaris semasa hidup berlaku sebagai kriteria utama untuk menentukan apakah ahli waris dapat menerima hak warisan atau tidak. Jika ahli waris menganut agama yang sama dengan yang dianut pewaris semasa hidupnya, maka ahli waris dapat menerima harta warisan, jika tidak, maka mereka tidak dapat apa-apa. Peraturan ini memang khas Islam, sebuah peraturan yang mencerminkan karakter religius dari sistem hukum yang dikembangkan. Walaupun persyaratan kesamaan agama panutan antara pewaris dan ahli warisnya tidak berasal dari Al-Qur'an melainkan hadis Nabi. Namun aturan ini dipandang fuqaha sebagai salah satu syarat terpenting dalam memutuskan pewarisan harta warisan kepada ahli waris. Begitu pula dengan Indonesia.

Persoalan muncul ketika ahli waris menganut agama yang berbeda dari yang dianut oleh pewaris. hal ini lumrah saja terjadi di negeri dimana praktek kewarisan yang dipakai berdasarkan hukum adat atau hukum Belanda seperti yang digariskan dalam Hukum Perdata (KUHP). Prinsip-prinsip yang memicu konflik biasanya

---

<sup>83</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 444

muncul manakala pewaris mengikuti hukum Islam, sementara ahli waris yang tidak berhak menerima warisannya menggunakan prinsip-prinsip hukum adat atau KUHPer untuk menentang proses pewarisan sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam<sup>84</sup>

Masih dinegeri yang kita cintai ada polemik yang muncul ketika para pejabat ataupun orang tua yang sibuk mengurus dunianya hingga anak-anaknya menjadi kafir pu tidak usah khawatir. Sebab Islam yang Nabinya, Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menegaskan “Orang Muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang Muslim,” cukup diingkari saja oleh orang-orang paramadina. Dan keingkarannya itu disiarkan dengan memberi petunjuk kepada umum lewat buku yang mereka klaim sebagai buku Fikih itu (Fikih Lintas Agama). Sampai-sampai si pejabat atau orang tua yang sibuk hingga tak becus mengurus anaknya, yang akibatnya anak-anak itu diurus oleh orang-orang kafir dan jadi kafirpun dibolehkan untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang Muslim. Mereka tidak menggubris lagi hadis sahih yang matannya kuat yang diriwayatkan dua imam terpercaya Al-Bukhari dan Muslim bahkan lainnya.<sup>85</sup>

Mereka berpendapat bahwa hadis yang melarang waris beda agama harus dibaca dalam semangat zamannya, yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir). Muslim dalam keadaan normal dan kondusif, secara otomatis matan hadis tersebut tidak bisa digunakan. Dan juga mereka berani memberlakukan hadis tersebut secara temporer belaka, padahal di zaman senormal apapun, istilah kafir itu tetap kafir, tidak berubah istilahnya jadi Muslim, kecuali dia masuk Islam. Lantas landasan pembatalan hadis itu apa ? dizaman normal ataupun tidak normal, yang namanya kafir ya kafir, Muslim ya Muslim. Jadi hadis tentang tidak waris mawarisi antara Muslim dan kafir itu berlaku di zaman apapun.

Hadis tidak waris mewarisi antara Muslim dan kafir itu mutlak, sebagaimana dalam hadis yang lain diriwayatkan:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين . (رواه الترمذي)

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 445.

<sup>85</sup> Hartono Ahmad jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 168.

Riwayat dari Jabir ; dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

“Tidak saling mewarisi pengikut dua agama.” (HR. At Tirmizi).

Hadis ini sudah jelas maknanya, tidak ada pengecualian apa-apa, berarti sifatnya mutlak. Tidak bisa diinterupsi oleh pendapat bahwa itu hanya berlaku di saat terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir).

Dalam hal tidak waris mewarisi antara Muslim dan kafir ini memang ada pengecualian, tetapi sebenarnya hanya semacam penjelasan, dan yang menjelaskan itu Nabi Muhammad Saw. Bukan orang paramadina yang tidak punya hak apa-apa dalam membuat syariat dalam Islam. Pengecualian yang sebenarnya merupakan penjelasan adalah : Kalau seorang lelaki (Muslim) memiliki budak (yang ahli kitab /Yahudi atau Nasrani), maka tuannya (Muslim) boleh mewaris harta budaknya itu (tentu saja ketika si budak meninggal dunia, karena pembicaraan waris adalah berkaitan dengan harta peninggalan si mayit). Ini karena budak itu memang dalam Islam adalah hak penuh tuannya. Jadi sifat pengecualian itu sebenarnya hanya penegasan penjelasan, dan yang menegaskan itu adalah Rasulullah Saw yang memang utusan Allah SWT.<sup>86</sup>

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرث اهل الكتاب ولا يرثنا الا الرجل يرث عبده او امته.  
( رواه الدارمي والطبراني رواته ثقه )

Riwayat dari Jabir, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

“Kami tidak mewaris (harta) Ahli Kitab dan mereka tidak mewarisi (harta) kami, kecuali laki-laki mewarisi (harta) budaknya (laki-laki) atau amatnya (budaknya perempuan).” (HR. ad Darimi dan athThabrani, para perawinya tsiqah/terpercaya).

Hadis tersebut , disamping mengandung makna pengecualian yang berisi penegasan penjelasan, masih pula mengandung penjelasan yang lebih jelas tegas lagi. Nabi Muhammad Saw dalam hadis itu menyebut “Ahli Kitab”, itu justru lebih tegas lagi dibanding lafal “Kafir”. Karena tidak waris mewarisi antara Muslim dengan Ahli Kitab itu maknanya lebih jelas lagi. Dengan ahli kitab saja Muslimin tidak waris mewarisi apalagi dengan kafir secara umum.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 170.

Sebenarnya hadis-hadis tersebut sudah sangat jelas. Ada tiga macam ungkapan untuk menegaskan tidak waris mewarisi itu adalah:

1. Ungkapan “Muslim-kafir” dalam hadis Muttafaqun Alaih.
2. Ungkapan “*Ahlu Millatain*” (antara pengikut dua agama) dalam hadis At-Tirmizi.
3. Ungkapan “Kami (Muslim) dan Ahli Kitab” dalam hadis Ad-Darimi dan Ath-Tabrani.

Sehingga dengan adanya tiga model ungkapan ini, dan sudah dilengkapi dengan yang harus dikecualikan, maka semuanya sudah tidak ada kesamaran lagi.<sup>87</sup>

Konflik hukum dalam kebanyakan kasus juga diikuti oleh kendala-kendala yudisial karena dalam rangka mencari penyelesaian, pihak muslim selalu cenderung membawa perkara ke Pengadilan Agama, sementara pada saat yang sama pihak non-Muslim akan pergi ke pengadilan umum. Sikap ini kita dapat maklumi kerana masing-masing pihak ingin mengikuti hukum waris yang lebih sesuai dengan keinginannya. Seperti dalam kesulitan-kesulitan hukum yang dihadapi pengacara dalam kasus perkawinan antar-iman, persoalan kewarisan antar-iman sebagian juga merupakan akibat kekosongan hukum. Namun dalam kasus kewarisan antar-iman, persoalan hukumnya lebih besar karena ia tidak hanya menyangkut masalah perbedaan interpretasi atas proposisi hukum tertentu, tapi juga merupakan konflik antara dua regulasi yang sama-sama berlaku dan sah ditanah air. Sudah barang tentu konflik hukum bukan perkara sederhana karena negara sendiri tidak disiapkan untuk melakukan berbagai upaya pencarian resolusi. Satu-satunya harapan terletak di genggam tangan hakim, yang bisa membuat resolusi apapun ditanggulangi dengan undang-undang negara saja. Karena itu, perlu kiranya dilihat bagaimana hakim mengemukakan penalaran dan argumennya dalam proses analisis terhadap konflik kewarisan antar-iman. Lewat jalur ini, bagaimana sikap umum negara terhadap tradisi hukum yang berkembang di tanah air juga bisa terbukti jelas.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 446.



Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad, orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi dari orang Islam.

*Riddah* atau Murtad menurut Bahasa adalah ”kembali”. Sedangkan menurut syara’ adalah memutuskan ke-Islaman dengan bermaksud kufur seketika atau masa akan datang. Maka tetap menjadi kufur seketika atau mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur dengan dibarengi i’tikad sikapnya itu atau dibarengi maksud menentang atau meremehkan, yang dilakukan oleh Mukallaf dalam keadaan bebas berbuat; maka tindak kemurtadan oleh anak kecil, orang gila orang dipaksa murtad yang hatinya tetap Mukmin adalah tidak menjadi (maksudnya tidak terkena hukuman had).<sup>89</sup>

Tentang non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang Muslim, maka ulama sepakat bahwa hal itu dapat diterima dan sejalan dengan ketentuan Al Qur’an dan hadis Rasulullah Saw. Akan tetapi dalam permasalahan seorang muslim yang menjadi ahli waris dari seorang non-Muslim, maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

Seorang Muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang berstatus non-Muslim atau murtad, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, diantaranya para sahabat Rasulullah Saw, dari kalangan Khulafa’ al-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman Bin Affan, Ali bin abu Thalib, dan para sahabat yang lain.<sup>90</sup> Adapun dari kalangan tabi’in diantaranya adalah Amru bin Utsman, Urwah, al-Zuhri, Atha’, Thaawus, al-Hasan, Umar bin Abdul al-Aziz. Begitu juga dengan al-

---

<sup>89</sup> As’ad, *Fathul Mu’in*, h. 278.

<sup>90</sup> Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al- Mubarakfuri, *Tuhfatu al- Ahwadzii*, Juz V (Kairo: al-Maktabah al- Taufiqiyah, t.th.), h. 617.

Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Malik al-Syafi'i Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas para fuqaha' yang lain.<sup>91</sup>

Landasan mereka adalah hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: “Seorang Muslim tidak menerima warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima warisan dari orang Muslim”.<sup>92</sup>

Mencermati kesimpulan ulama Fikih ditilik dari sudut pandang *Grand Theory* kedaulatan tuhan, bahwa kesimpulan tersebut atas dasar hadis yang muttafaqun alaih, maka dapat diyakini kebenarannya, karena apa yang diucapkan sesuai dengan firman Allah Ta'ala.

Sedangkan menurut sudut pandang teori hukum; setiap orang beragama tunduk kepada hukum yang dianutnya; maka sebagai orang yang beragama Islam yang taat dan patuh kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya tidak boleh mencari-cari pilihan lain apabila Allah dan Rasul-Nya memberikan penggarisan yang jelas dan tegas. Mencari haillah atau pembenaran atas hasil pemikiran dengan menyingkirkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, telah diperingatkan, ditegur, diancam, dan berbagai titel seperti zalim, fasiq, dan sebagainya agar tidak menyimpangi hukum-hukum Allah. Rasulullah Saw diutus dalam rangka mentauhidkan umat manusia, meng-Esa-Kan-Nya dan menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang sempurna. Beliau menyampaikan risalah tidak dengan memaksa bagi orang yang beriman berlakulah ketentuan-ketentuan yang ada dalam risalah kenabian beliau, seperti rukun Iman dan rukun Islam.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz VIII (Kairo : Daar al-Hadis, 1425 H/ 2004 M), h. 495.

<sup>92</sup> HR. Al-Bukhari, dalam kitab: *Faraidh*, bab: Seorang Muslim Tidak Menerima Warisan dari Orang Kafir dan Orang Kafir Tidak Menerima Warisan dari orang Muslim, (Hadis no. 6764) (Beirut: Kitab al-Ilmiah Libanon, 1992).

<sup>93</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI), h. 191.

Ulama-ulama Mujtahid sepakat atas dasar nash-nash hadis, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak Muslim /Muslimah bukan ahli waris. Non-Muslim masuk kategori penghalang mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam teori maqhashid al-Syari'ah-nya yaitu:

وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معا

Artinya: Syari'at dibuat sesungguhnya demi kemashlahatan manusia, baik di dunia dan akhirat.<sup>94</sup>

Disinilah konsep maqhashid al-Syari'ah yang mempertahankan aspek pemeliharaan agama (hifd al-din), merupakan tujuan utama syari'atkan hukum kewarisan dalam Islam, yakni menguji keimanan umat manusia. Khususnya yang meyakini Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Apakah mereka beriman ataukah mereka menolaknya.

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena bila khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama.<sup>95</sup>

Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Mahkamah Agung memberi wasiat wajibah kepada salah seorang anak perempuan pewaris murtad, baik Hakim Tingkat Banding maupun Hakim Agung Tingkat Kasasi dalam perkara ini casu sepakat membatalkan putusan hakim Tingkat Pertama yang tidak memberi bagian kepada anak yang murtad tersebut. Putusan memberi bagian atas dasar wasiat wajibah tersebut telah mempengaruhi pikiran sejumlah hakim pada pengadilan Agama, yang menyatakan setuju dengan putusan tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai kelompok yang sepakat menolak Hadis Rasulullah diatas.<sup>96</sup>

Dalam hukum waris Islam, Allah SWT dengan tegas melarang untuk tidak mengakui anak angkat sebagai penerima harta warisan. Lebih dari itu meskipun dia

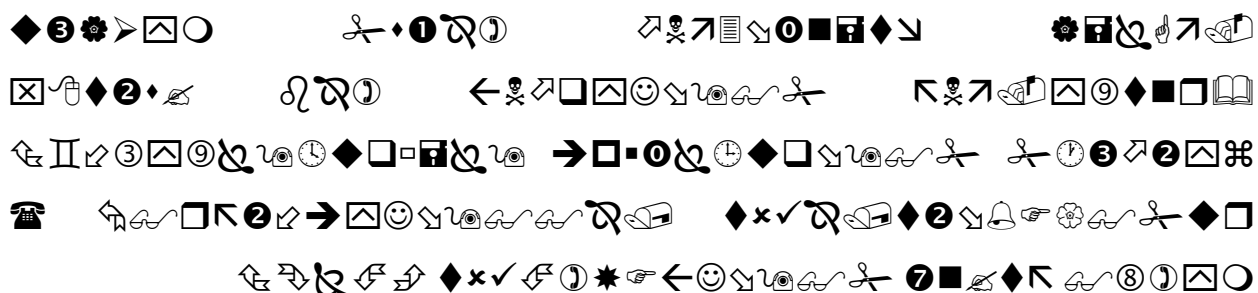
---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 192.

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 193.

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 194.

anak kandung sendiri, apabila dia murtad terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh mendapatkan harta warisan pemaksaan hukum dalam bentuk menggaransi pemberian waris kepada anak angkat tentu dapat disebut melawan hukum Allah karena itu bertentangan dengan Al Qur'an Surat al- Baqarah ayat 180 yang berbunyi:



Artinya: “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut.

Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah:180

Syaikh Muhammad Abduh menjelaskan sebagai berikut: Tidak ada satu keterangan pun yang menunjukkan bahwa ayat waris diturunkan sesudah ayat wasiat. Dan juga susunan ayat itu mengesampingkan tentang nasakh-annya, karena Allah SWT, manakala Dia mendatangkan satu-satu hukum dan diketahui-Nya bahwa hukum itu akan di-nasakh-kan Nya , maka tidaklah hukum yang disyari'atkan-Nya itu di ta'kidkan dan dikukuhkan-Nya sebagaimana Dia mengokohkan ayat ini Dia berfirman: sebenarnya atas orang-orang yang takut, tidak dapat tidak janji siksa bagi orang yang berani menukarinya (QS 11: 181).<sup>97</sup>

Seorang Muslim bisa menjadi ahli waris bagi non-Muslim. Sebaliknya, seorang non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi seorang Muslim. Ini merupakan pendapat sebagian ulama diantaranya Muawiyah, Muadz bin Jabal, Abu Darda', Said

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 195.

bin Musayyib, Ali bin Husein, Ibnu Hanifah, (Muhammad bin al-Hanafiyah), Masruq, al-Nakha'i, al-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq.<sup>98</sup>

Akan tetapi pendapat ini tidak bisa disandarkan kepada mereka sepenuhnya, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, bahwa Imam Ahmad mengatakan, “Tidak ada perbedaan (pendapat) diantara manusia (ulama) bahwa seorang Muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang kafir.<sup>99</sup>

Jadi, kalau salah seorang diantara anak-anak mayit ada yang beragama non-Muslim, lalu masuk Islam sesudah orang yang mewarisi itu meninggal dan *tirkahnya* dibagikan kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab, orang tersebut tidak berhak atas waris. Tetapi mereka berbeda pendapat bila dia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal dunia tapi *tirkahnya* belum dibagikan.

Imam Hanbali mengatakan : dia berhak atas waris. Sedangkan Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan : dia tidak berhak atas waris.<sup>100</sup>

Sedangkan orang murtad menurut pendapat ulama mazhab yang empat, tidak berhak atas waris, baik murtadnya itu dari fitrah maupun dari *millah*,<sup>101</sup> Kecuali bila dia bertaubat sebelum dilakukan pembagian *tirkah* .<sup>102</sup>

Imamiyah<sup>103</sup> mengatakan : Orang yang murtad dari fitrah, manakala dia seorang laki-laki, dia harus dibunuh dan tidak diampuni. Istrinya harus menjalani iddah wafat

---

<sup>98</sup> Al- Nawawi, al-Majmu', Juz XVII h. 190. al- Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Juz XI h. 53-54; Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatu al- Ahwadzii*, Juz V h. 617; dan al-Adzim Abadii, Aunu al- Ma'buud, Juz V, h. 316.

<sup>99</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz VIII, h. 495.

<sup>100</sup> Muhammad, *Fikih Lima Mazhab*, 542.

<sup>101</sup> Murtad dari agama Fitrah adalah bila seorang dilahirkan sebagai seorang Muslim kemudian murtad dari agama Islam, sedangkan yang dimaksud dengan murtad dari millah adalah manakala seseorang dilahirkan kafir, kemudian menjadi Muslim, lalu sesudah menjadi Muslim, dia kembali lagi kepada kepercayaannya atau agama lain.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 542.

<sup>103</sup> Imamiyah adalah Ja'far Ash-Shadiq dengan nama Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Saw. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M). Ibunya bernama Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq. Pada beliau terdapat perpaduan darah Nabi Saw dengan Abu Bakar as-Siddiq ra.

semenjak saat kemutadan suaminya. Lalu *tirkahnya* dibagi-bagi, sekalipun dia belum berhasil dibunuh, dan taubatnya tidak dapat diterima dalam hal pembatalan pernikahan, pembagian *tirkah*, dan hukuman mati, walaupun pada kenyataannya dan di sisi Allah serta pada hal-hal lain seperti kesucian badannya dan keabsahan ibadahnya, taubatnya dapat diterima; sebagaimana juga ia memiliki harta baru yang ia peroleh sesudah dia bertaubat, baik melalui kerja, berdagang, maupun menerima waris.

Menuru Imamiyah ada tiga masalah perbedaan agama merupakan sebab menghalangi hak mewarisi yaitu:

Pertama: non Muslim tidak dapat mewarisi dan sudah disepakati mazhab jumhur Muslimin

Kedua : Muslim mewarisi non-Muslim. Atas dasar ini Muawiyah bi Abi sofyan memerintahkan para hakimya untuk memberikan hak waris bagi Muslim dari non-Muslim dan tidak sebaliknya.

Ketiga: bila ada seorang Muslim meskipun tingkatannya jauh, dia harus didahulukan atas non Muslim yang tingkatannya lebih dekat. Dalam masalah ini, kami tak mengetahui ada orang lain yang berpendapat demikian selain Syiah Imamiyah.

Imamiyah telah menjelaskan alasan dibalik tidak adanya pewarisan non-Muslim dari Muslim. Yaitu, warisan itu adalah kekuasaan (wilayah) dan pengalihan (khilafah), dan tidak ada wilayah bagi no-Muslim atas Muslim. Tetapi seorang kafir zimmi. Selama dia berada dalam negeri Islam, maka dia berada dalam wilayah kaum Muslimin, di dalamnya dia mempunyai hak atas mereka. Aturan ini membenarkan terjadinya pewarisan antara zimmi dan Muslim. Tetapi, Muslim lebih berhak terhadap warisan seorang zimmi ketika ahli warisnya terdiri dari Muslim dan non-Muslim.<sup>104</sup>

Sedangkan orang murtad dari *millah*, diminta untuk bertaubat, maka dia memperoleh hak-hak sebagaimana yang diterima oleh kaum Muslimin lainnya. Serta mempunyai kewajiban yang sama pula dengan kewajiban mereka. Tetapi bila tidak mau bertaubat, dia wajib dibunuh, lalu istrinya menjalani *iddah* talak semenjak kemurtadan suaminya itu. Kalau orang itu bertaubat ketika istrinya masih dalam *iddah*, istrinya itu

---

Ahlusunah berpendapat bahwa Ja'far Ash- Shadiq adalah seorang mujtahid dalam ilmu Fikih, dan dianggap sudah mencapai ketingkat ladunni. Dikalangan para syaikh terkemuka Ahlusunah, beliau dianggap sebagai sufi, karena pada dirinya terdapat puncak pengetahuan dan darah Nabi Saw yang suci.

<sup>104</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h.84-85.

kembali kepadanya (rujuk), dan *tirkahnya* tidak bisa dibagi-bagikan sampai kelak dia terbunuh atau meninggal dunia.<sup>105</sup>

Sedangkan warisan orang-orang beragama lain (non-Islam) ulama Fikih berbeda pendapat. Imam Maliki dan Hanbali mengatakan : Para penganut agama-agama non-Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain. Dengan demikian seorang Yahudi tidak bisa mewarisi orang Nasrani, dan sebaliknya, demikian pula halnya dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya satu sama lain.

Imamiyah, Hanafi, dan Syafi'i mengatakan : Mereka bisa saling waris-mewarisi satu sama lain. Sebab mereka mempunyai millah yang sama. Mereka semuanya adalah orang-orang non-Muslim. Akan tetapi Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling waris-mewarisi antar mereka itu sepanjang tidak ada diantara mereka pewaris yang mempunyai ikatan kekerabatan jauh, dia dapat menghalangi kerabat lain untuk memperoleh warisan, sekalipun yang disebut terkemudian ini memiliki ikatan kekerabatan yang lebih dekat. Persyaratan ini tidak diterima di kalangan mazhab yang empat. Sebab, bagi mereka seorang Muslim tidak bisa mewarisi non-Muslim.<sup>106</sup>

Adapun kaum Ghulat kaum Muslimin sepakat bahwa, orang-orang ghulat adalah tergolong musyrik dan bukan orang-orang Muslim dan tidak ada hubungannya dengan kaum Muslim sedikitpun. Akan tetapi Imamiyah khususnya bersikap amat keras terhadap orang-orang ghulat ini. Sebab saudara-saudara mereka yang sunni, secara semena-mena telah menimpakan dosa kaum ghulat kepada pundak Syi'ah. Para ulama mazhab Imamiyah menegaskan dalam kitab-kitab aga'id dan fikih mereka tentang kekafiran orang-orang ghulat ini, antara lain dalam buku syarh Aga'id Al- Shaduq karya Syaikh Al- Mufid. Pada halaman 63, cetakan tahun 1371, beliau mengatakan "Orang-orang ghulat yang berpura-pura Islam, adalah orang-orang yang menuhankan atau menganggap Nabi kepada imam Ali dan para imam keturunannya, dan menundukkan beliau-beliau pada tempat yang berlebih-lebihan tingginya. Baik dalam urusan agama maupun duniawi. Mereka telah keluar dari kebenaran. Mereka adalah orang-orang sesat dan kafir yang telah diputuskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk dibunuh dan dibakar. Para imam pun menjatuhkan keputusan bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan telah keluar dari Islam.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 542

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 543.

Orang yang mengingkari apa yang disebut sebagai kemestian dalam agama. Para ulama mazhab sepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari hal-hal yang menyatakan dan diketahui suatu kepastian dalam agama (*al-ma'lum min al-din bi al-dharurah*). Misalnya mengatakan terhadap yang haram itu sebagai halal, dan terhadap yang halal itu sebagai haram, lalu yang demikian itu dijadikan sebagai pegangannya. Dalam keadaan seperti ini, berarti ia telah keluar dari Islam dan masuk kedalam kekufuran. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang menuduh seorang Muslim sebagai kafir.<sup>107</sup>

Ada dua masalah yang akan dikemukakan penulis dengan melihat pendapat ulama Imamiyah yaitu Agha Ridha Al- Hamdani, dalam jilid I bukunya yang berjudul Misbah Al-Faqih yaitu:

Masalah pertama : Kalau ada seseorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim dan mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan kita tahu apakah dia memperlihatkan hal itu karena riya' tanpa disertai keimanan dan keyakinan, atautkah dia mengucapkannya betul-betul berdasar keimanan, maka kita wajib menetapkan bahwa dia adalah seorang Muslim, dan ini tidak diperselisihkan oleh para ulama sedikitpun. Akan tetapi bila kita mengetahui betul kebohongannya, dan bahwasanya dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah, dan Rasul-Nya, tetapi menyatakan dirinya sebagai seorang Islam semata-mata karena riya' dan kemunafikan, karena adanya maksud-maksud tertentu, maka bisakah konsekuensi-konsekuensi keislaman yang berlaku pada setiap Muslim berlaku padanya?

Kesimpulan dari pandangan Syaikh Ridha Al Hamdani adalah bahwa, orang seperti itu memiliki segi kenyataan dan segi lahiriah. Secara nyata dia bukan seorang Muslim, tapi lahiriahnya dia adalah Muslim. Kita harus menyerahkan segi kenyataannya kepada Allah SWT. Dan tidak diragukan lagi bahwa Allah pasti memperlakukannya sebagai orang yang bukan Muslim, sebab kenyataannya memang begitulah. Sedangkan bagi kita kaum Muslimin ini, yang kita tetapkan adalah bukti-bukti lahiriyahnya. Dengan demikian, kita harus memperlakukannya sebagai Muslim, baik dalam segi *munakahat* maupun *mawaris*. Sebab, kita memang diperintahkan untuk melakukan yang demikian itu. Dalam sebuah hadis disebutkan :

---

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 544.



Artinya : “Barangsiapa mengucapkan Tiada Tuhan selain Allah, maka dipelihara darah dan hartanya.”

Maksudnya, diberlakukanlah hukum Islam atasnya, baik kita tahu kebenaran ucapannya maupun tidak, ini dibuktikan pula oleh tindakan Rasulullah Saw, terhadap orang-orang munafik, yang diperlakukan sebagaimana Muslim yang lainnya, padahal beliau tahu betul kemunafikan mereka.

Masalah kedua : Rahasia ijma' kaum Muslimin terhadap kekafiran orang yang mengingkari apa yang disebut sebagai suatu kemestian dalam agama, adalah bahwa pengingkaran seperti itu berakibat pada pengingkaran terhadap risalah kenabian sendiri. Sudah barang tentu seseorang sadar bahwa pengingkarannya tersebut berakibat pada pengingkaran kenabian dan Risalah Muhammad Saw. Tanpa diragukan lagi adalah bukan Muslim. Akan tetapi bila ia tidak sadar akan hal itu, dan ia betul-betul lalai, atau justru meyakini bahwa pengingkarannya tersebut tidak berakibat pada pengingkaran risalah, maka muncul pertanyaan: apakah dia Muslim?

Kesimpulan dari jawaban Syaikh al-Hamadani adalah bahwa, orang seperti itu memiliki beberapa kemungkinan, bisa jadi kelalaiannya itu lahir karena keberlurutannya dalam melakukan kemaksiatan dan ketidakpeduliannya terhadap hal-hal yang haram (dilarang). Misalnya orang yang terus-menerus melakukan zina sejak awal, lalu perbuatan itu terus berlanjut sampai tua, sehingga melahirkan keyakinan bahwa zina adalah halal, maka yang demikian ini jelas kafir. Kadang-kadang hal seperti muncul karena orang tersebut mengikuti pendapat orang yang tak patut, bahkan tidak boleh diikuti. Yang demikian ini juga kafir. Bahkan andaikata dia meyakini bahwa pengingkarannya tersebut tidak menyebabkan adanya pengingkaran terhadap risalah Nabi Muhammad Saw.

Kemungkinan ketiga adalah bahwa penyebab kelalaiannya itu bukan karena dua faktor yang disebutkan diatas, tapi anggapannya yang seperti itu muncul karena ketidaktauannya terhadap fungsi risalah, yang bila dia tahu akan hal itu, niscaya dia kembali dari pengingkarannya tersebut. Orang seperti ini jelas masih Muslim. Sebab keadaan

dirinya dapat dilibatkan dengan orang yang mengingkari sesuatu dari Rasulullah karena memang tidak tahu hal itu. Dan ketika dia tahu, dia tidak lagi mengingkarinya.<sup>108</sup>

Namun, sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan diatas, masalah perbedaan agama sebagai salah satu halangan menerima warisan terhitung sensitif. Ia tidak hanya berkait dengan benturan antara kepentingan mendapatkan warisan dari satu sisi, tetapi juga dengan pola relasi antar umat beragama yang sarat ketegangan di sisi yang lain. Benturan yang sensitif terhadap hal tersebut ternyata sudah dirasakan oleh para ahli hukum Islam pada masa awal. Terbukti tokoh-tokoh sahabat sekaliber Muaz ibn Jabal dan Mu'awiyah ibn Sufyan pernah menghadapi kasus pelik terkait sengketa harta warisan. Diceritakan, suatu saat, Mu'az kedatangan dua orang tamu bersaudara yang bersilang-sengketa memperebutkan harta warisan. Keduanya berlainan agama; Muslim dan Yahudi, sementara ayah mereka baru saja meninggal dunia kebetulan beragama Yahudi. Pasca kematian sang ayah, sang anak yang beragama Yahudi mengklaim semua harta warisan milik dia. Sedangkan saudaranya yang Muslim berbeda agama dengan sang ayah. Tentu saja, anak yang Muslim berkeberatan dan menuntut bagian harta warisan. Menghadapi kasus tersebut, Mu'az dan Mu'awiyah ternyata menyampaikan fatwa yang berbeda dengan landasan tekstual (baca: Hadis) yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa anak yang Muslim sama dengan yang beragama Yahudi, yaitu sama-sama berhak menerima warisan. Argumentasi tekstualnya adalah hadis berikut ini.

الاسلام يزيد و لا ينقص . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم

“Islam akan selalu bertambah dan tidak kan pernah berkurang. (HR. Abu Daud, dinilai sahih oleh al Hakim”).<sup>109</sup>

Uniknya, meskipun berpijak kepada landasan tekstual yang cukup membuat kita mengernyitkan dahi, fatwa Mu'az dan putusan Mu'awiyah tersebut ternyata diamini oleh sejumlah tokoh kalangan tabi'in, seperti Masruq, Said ibn al-Musayyab, Ibrahim al-Nakha'i dan Abdullah ibn Ma'qil, bahkan tokoh tersebut terakhir secara terang-

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 546.

<sup>109</sup> Kementrian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* ( Jakarta: 2012), h. 154.

terangan menyatakan kekagumannya terhadap fatwa dan putusan yang dianggapnya brilian itu.

ما رأيت قضاءً أحسن من قضاء قضى به معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثونا كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم

“ Belum pernah dijumpai putusan yang secerdas dan sebrilian putusan Mu’awiyah. Orang Islam bisa menerima warisan ahl al-Kitab, sementara mereka tidak bisa menerima warisan dari orang Islam. Sama dengan pernikahan; orang Islam bisa menikahi perempuan kalangan mereka, tetapi mereka tidak bisa menikahi perempuan muslimah.”

Terlepas dari kontroversi seputar validitas transmisi (sanadnya), riwayat di atas menyiratkan dua hal penting, yaitu :

1. Sengketa harta warisan, terlebih-lebih yang diwarnai oleh nuansa ketegangan antar agama, adalah kasus sensitif yang memerlukan penalaran yang komprehensif dan bijak. Di satu sisi, berpijak hanya kepada acuan tekstual an sich hanya akan berpotensi memperparah ketegangan. Sementara di sisi lain, bukan cara yang tepat, karena akan mendapatkan penolakan dimana-mana.<sup>110</sup>
2. Inovasi hukum yang mengakomodir kebutuhan dan kondisi aktual telah dilakukan semenjak masa awal Islam. Dalam ruang lingkup hukum waris Islam, inovasi masalah warisan beda agama sebagaimana yang diceritakan oleh riwayat Mu’az ibn Jabal dan Mu’awiyah di atas, hanyalah satu contoh saja dari sekian banyak inovasi hukum waris yang dilakukan pada masa sahabat. Sebut saja misalnya masalah ‘awl, radd, gharrwayn dan musyarakah. Masalah-masalah kewarisan tersebut sarat dengan inovasi, karena setelah jika diamati dengan cermat dan kritis, semuanya telah mengubah (sedikit-sedikit) bagian semua ahli waris dari apa yang tetuang secara definitif dalam teks Al Qur’an. Menariknya, semua inovasi tersebut ternyata tidaklah selalu bergulir dengan mulus. Perlawanan dari sejumlah sahabat lain, utamanya yang behaluan skiptualis, terhitung cukup keras dan sengit. Sebagai contoh, pada kasus masalah musyarakah, Umar ibn al-Khattab, sang tokoh penggagas saat itu sedang

---

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 155.

menjabat sebagai khalifah, ditentang habis-habisan oleh Abdullah ibn Abbas dan Ubay ibn Ka'ab. Alasan mereka, gagasan Umar tersebut berlawanan dengan ketentuan tektual Al Qur'an.<sup>111</sup>

Fakta di masyarakat secara umum, ketentuan halangan menerima warisan, sebagaimana yang diatur dalam hukum waris Islam dan KHI, masih dianggap sebagai ketentuan terbaik dan final dikalangan masyarakat. Utamanya yang berbasis keagamaan kuat. Terbukti Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI), hingga saat ini, tetap memakai sebagai salah satu dasar hukum.<sup>112</sup> hal juga sama juga dijumpai pada komunitas pesantren, terutama dengan formulasi kurikulum dan kerangka pemikiran yang berbasis kitab kuning yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Terbukti, belum dijumpai hasil bahtsul masa'il dari komunitas pesantren yang menghasilkan produk hukum yang berbeda.

Hanya di kalangan masyarakat yang hukum adatnya relatif kuat, atau mungkin yang beragam pemeluk agamanya saja yang sedikit memiliki perbedaan. Sebut saja misalnya masyarakat desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta yang sudah tidak asing dengan pewarisan lintas agama.<sup>113</sup>

Dari uraian panjang lebar tentang halangan menerima warisan diatas, bisa dipahami bahwa hukum Islam berada di antara dua sisi yang berlawanan. Dari satu sisi, ia terikat dengan teks Al-Qur'an dan Hadis yang memuat ragam ketentuanteknis kewarisan yang sudah dianggap baku. Piranti metodologis (ushul fikih) yang ada selama ini dibangun dalam suatu konstruksi teoretik yang menguatkan teks-teks tersebut. Namun di sisi lain, hukum waris Islam berhadapan langsung dengan realita sosial yang dinamis serta berkembang sedemikian rupa, sehingga menuntut berbagai inovasi dan adaptasi yang acapkali berlawanan dengan muatan teks.<sup>114</sup>

#### **d. Berlainan Negara**

---

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 156.

<sup>112</sup> Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 160.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 161.

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 162.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara sendiri dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan negara asing. Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila diantara ahli waris ada yang mewarisi berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan di muka, apabila dua negara sama-sama Muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi.

Menurut Hasbi ash-Siddieqy dalam bukunya Fikhul Mawaris yang dimaksud dengan perbedaan tempat atau (negeri) ialah: berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. umpamanya waris menjadi rakyat bagi suatu negara yang merdeka, sedang muwaris menjadi rakyat bagi negara merdeka yang lain. Semua ulama sependapat menetapkan, bahwasanya berlainan tempat tidak menjadi penghalang bagi pusaka mewarisi antara sesama Islam, walaupun berbilang-bilang pemerintahannya. Dan jauh-jauh jaraknya yang satu dengan yang lainnya, serta berbeda pula tata aturan pemerintahannya, namun dipandang sebagai suatu negara; dengan ijma' segenap fuqaha Islam. Maka perbedaan kebangsaan dan berlainan pemerintahan tidak menjadi penghalang bagi menerima pusaka. Karena itu seorang Muslim Indonesia mewarisi harta peninggalan istrinya yang Islam yang berkebangsaan Turki umpamanya, sebagai mana orang Muslim Indonesia menerima pusaka dari kerabatnya yang berkebangsaan India umpamanya.

Dalam hal ini berbeda pendapat ahli-ahli mazhab tentang perbedaan tempat antara orang-orang yang bukan Islam. Apakah perbedaan tempat menjadi penghalang atau tidak. Menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa berlainan tempat merupakan penghalang dari pusaka mewarisi antara orang-orang bukan Muslim. Dan berlainan negeri terhadap orang-orang yang bukan Muslim adalah apabila ada *ishmah* antara dua negara itu dan masing-masing memandang halal memerangi yang lain, serta tak pula hubungan persahabatan.

Maka untuk memandang bahwa dua negeri itu, satu terhadap orang-orang yang bukan Muslim, haruslah berujud dua urusan ini.

Pertama: tidak putusnya *ishmah* antara kedua negeri itu.

Kedua: adanya persahabatan yang baik antara kedua negeri itu.

Maka apabila kedua urusan ini tidak berujud, dipandanglah negeri-negeri yang berlainan. Adapun negeri-negeri Islam, yaitu yang berlaku didalamnya kekuasaan Islam, maka semua negeri-negeri itu dipandang suatu negara.

Menurut mazhab Malik, Ahmad dan Ahludh Dhahir, bahwasanya berlainan negeri tidak menjadi penghalang bagi penerimaan pusaka terhadap orang yang bukan Muslim. Beliau-beliau ini berpegang kepada Nash-nash yang umum. Dan tak pula sesuatu dalil yang mensyaratkan bersatunya negeri antara barang yang bukan Muslim.<sup>115</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa berlainan negara tidak menghalangi warisan, berdasrakan ini mereka mengatakan kafir harby waris mewarisi walaupun negara mereka berlainan. Adapun jumhur, mereka berdalil dengan mangatakan bahwa umum yang datang mengenai warisan menghendaki mereka waris mewarisi dan tidak ada datang nash atau ijma' yang mengtakhsiskan mereka, dan tidak sah pula qiyas, mak tetaplah beramal dengan umum nash.<sup>116</sup> Yang memperhatikan mengenai keterangan ulama Hanafiyah , melihat bahwa ulama Hanafiyah tidak bermaksud dengan berlainan negara yang menghalangi warisan semata-mata berlainan kebangsaan seperti orang Mesir dan orang Inggris,orang Jerman dan orang Italia. Sehingga tidak ada waris mewarisi antara orang Inggris dan orang Perancis dan lain-lain bangsa-bangsa yang beradab. Tetapi mereka maksudkan ialah apa yang ditunjukkan oleh tiga unsur yang harus ada dalam menentukan perbedaan negara. Sudah pasti bahwa adanya ketiga unsur ini tergantung pada dalam keadaan perang saja. Adapun dalam keadaan damai, maka tidak ada diantara negara-negara kecuali tolong-menolong dan saling manfaat memanfaatkan. Seringkali terjadi diantara negara-negara itu perjanjian-perjanjian yang menegaskan tolong-menolong dan hormat menghormati akan hak pihak lain dan undang-undangnya. Dengan demikian tidak mungkin dikatakan bahwa diantara bangsa-bangsa itu terputus jaminan keamanan yang menyebabkan terputus hak wali, sehingga tercegah pula hak waris mewarisi yang sebabnya sudah pasti.

Tidak dapat disnagkal bahwa keadaan perang itu termasuk hal-hal yang mendatang dan peri kemanusiaan menghendaki segera diakhiri dan kembali kepada pokok perdamaian yang umum. Dengan demikian, maka peperangan itu tidaklah terus

---

<sup>115</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Fikihul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.64-65.

<sup>116</sup> Mahmoud Syaltout, Ali As- Sayis, *perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih* (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 318.

menerus terjadi antara bangsa-bangsa sehingga perlu diputuskan hukum warisan yang didasarkan kepada hubungan kerabat dan hubunngan yang telah tetap. Sedangkan syara' tidak memperhitungkan keadaan mendatang semacam ini diantara kaum Muslimin, karena hukum Islam adalah umum yang mengumpulkan kaum Muslimin dalam satu kandang. Maka demikian pula kebutuhan manusia seluruhnya untuk damai, lari mereka dari peperangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ini, seperti perjanjian-perjanjian yang mengikat para bangsa.<sup>117</sup> Semua itu menjadikan umat yang berbeda-beda kebangsaanya bagaikan suatu umat. Dan inilah yang kita lihat sekarang ini diantara negara-negara dan juga diantara perorangan, dengan begitu keamanan menjadi komandan, sedang semua hak terjaga, darah terpelihara dan harta benda terjamin. Dengan demikian maka tidak ada jalan lagi untuk mengatakan terputusnya hak perwalian diantara mereka dan menjadikan keadaan perang yang datang itu sebagai dasar untuk hukum yang umum.

Apabila anda telah mengetahui bahwa syara' memelihara semua perjanjian sampai kepada batas dikatakan mengenai kesemua perjanjian sampai kepada batas dikatakan mengenai keadaan orang Mukmin yang bermukim diantara orang-orang kafir.



<sup>117</sup> Ibid, h. 319.



“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al- Anfal :72)

Apabila anda mengetahui itu, pasti anda tidak ragu lagi bahwa syara' tidak memandang perbedaan negeri itu menjadi penghalang dalam waris mewarisi dalam suatu masa yang para bangsa dalam bidang sosial, politik dan perdagangan, berpegang kepada diktum-diktum perjanjian dan undang-undang Internasional yang umum dan khusus. Dari sini jelaslah bahwa mazhab jumhur adalah kuat dan patut dipergunakan dalam praktek mengenai warisan. Panitia Personenrecht (musykilah tahun 1937 untuk meninjau perubahan Undang-Undang Personenrecht). Telah berpendapat bahwa perbedaan negeri tidak menghalangi waris mewarisi, tersebut dalam pasal 6 rancangannya : Perbedaan negeri tidak menghalangi waris mewarisi, selama Undang-Undang negeri yang diikuti oleh orang asing yang bukan Muslim itu tidak melarang pewarisan orang asing.<sup>118</sup>

Tersebut dalam memori penjelasannya sebagai berikut :

“Berlainan negeri tidak menghalangi waris mewarisi antara orang-orang Islam itu disepakati semua ulama. Tetapi para Imam berbeda pendapat apakah terhadap non-Muslim itu menjadi penghalang atau tidak”. Jadi jelaslah bahwa panitia tersebut mengambil kedua pendapat itu sekaligus dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus salah satu dari negara-negara tidak membolehkan jatuh warisan kepada orang asing, Panitia mengambil mazhab Abu Hanifah, dan dalam kasus negara itu tidak melarang warisan

---

<sup>118</sup> *Ibid*, h. 320.



jatuh kepada orang asing, panitya mengammbil mazhab jumhur, dan ditetapkan bahwa pemerintah dapat memilih diantara kedua pendapat itu sesuai dengan kemaslahatan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid*, h. 321.

## **BAB IV**

### **PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN**

#### **Gambaran Umum Wilayah**

Sebelum penulis mengemukakan pandangan ulama kota Medan terhadap penghalang mendapatkan warisan disini akan di paparkan sekilas gambaran umum dari wilayah kota Medan.

##### **1. Geografis dan Demografis**

Kota Medan terletak antara 2° - 27- 2° 47' Lintang Utara 98° 44' Bujur Timur, dan berada 2,5- 37,5 diatas permukaan laut.

Daerah ini merupakan salah satu dari 25 Daerah Tingkat II di Sumatera dengan luas wilayah sekitar 265,10 km. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur. Sebagian besar Wilayahnya merupakan daratan rendah tempat pertemuan dua sungai penting yaitu sungai babura dan sungai deli. Pemerintahan kota Medan dipimpin oleh seorang Walikota, wilayahnya terbagi dalam 151 kelurahan dan 2000 lingkungan.

Kota Medan dihuni 3.094.945 jiwa terdiri dari laki-laki 1.027.07 jiwa dan perempuan 2.067.288 jiwa. Kota ini merupakan kota terbesar di Sumatera Utara dan ketiga terbesar di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya.<sup>120</sup>

##### **2. Kehidupan Keagamaan**

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000- 2014, diperkirakan jumlah penduduk menurut agama secara keseluruhan mencapai 12.962.332 jiwa, yang terdiri dari penganut agama Islam 8.483.433 jiwa (65,45%), penganut agama Kristen 3.450.407 jiwa (26,62%), Katolik 620.084 jiwa (4,78%), Budha 365.957 jiwa (2,28%), Hindu 24.027 jiwa (0,19%), Khonghucu 3.655 jiwa dan lainnya 4.524 jiwa.

Kehidupan beragama di Kota Medan cukup marak, hal itu terbukti bahwa Kota Medan tidak plural dalam etnis dan budaya, melainkan juga dalam hal agama.

Dalam rangka pengembangan kehidupan beragama terlihat di Kota Medan terdapat beragam organisasi sosial keagamaan, meliputi: Nahdhatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah, Persis, Perti, badan Kontak Majelis Taklim, Persatuan Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia. Begitu pula mereka organisasi pemuda seperti: Pemuda

---

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta:Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 177.

Muhammadiyah, Pemuda Al-Washliyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pemuda Anshar, Nasiatul Aisyiyah, Pemuda Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pemuda Katolik, Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Pemuda Hindu dan Persatuan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PMBI).

Daerah ini memiliki tempat ibadat beragam yaitu 684 masjid, 394 mushalla dan 1348 langgar/surau. Umat Kristen memiliki 237 gereja, umat Katolik memiliki 84 gereja, umat Hindu memiliki 11 pura dan umat Buddha memiliki 52 vihara.

Heteroginitas agama yang ada di Kota Medan dapat menyadarkan semua lapisan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda lintas agama untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama.<sup>121</sup>

Kesadaran ini dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKAPA). Tujuan forum ini adalah untuk menggalang mas agar masing-masing umat beragama tidak saling mengganggu, Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama ini menurut Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis sangat berbeda yang dengan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama yang dikesankan sebagai wadahnya kaum elit di Sumatera Utara. Karena acara dialog tersebut seringkali hanya melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemerintahan. Program Kerukunan Umat Beragama dalam bentuk dialog itu hanya dihadiri para elit daerah. Sebagai pembicara nara sumber dari tahun ketahun tidak berganti.

### **3. Perbedaan Kompilasi Hukum Islam Dengan Fikih Waris**

Menurut ulama dan Hakim agama Kota Medan mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah Fikih Indonesia. Hasil Ijtihad ulama-ulama Indonesia. Sedangkan Fikih waris adalah pendapat-pendapat paa mazhab seperti: mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki.

Ketua Pengadilan Agama Kota Medan mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum Indonesia yang sangat sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam memang masih ada yang perlu diberikan penjelasan-penjelasan sehingga mendapatkan suatu kesempurnaan dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya dalam persoalan Ahli Waris Pengganti, harta gono gini dan masalah anak angkat. Di pengadilan Agama Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pegangan dalam memutuskan suatu perkara, oleh karena itu ada sebagian kecil yang perlu direvisi dan sebaiknya Kompilasi hukum Islam ini ditingkatkan menjadi undang-undang.<sup>122</sup>

Ketua Pengadilan Agama Kota Medan mengatakan bahwa tidak semua isi Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hukum kewarisan sesuai dengan Fikih Islam, seperti contoh tentang masalah Wasiat Wajibah untuk anak dan bapak angkat. Dalam masalah-masalah tersebut Ketua Pengadilan Agama Kota Medan, dalam penerapan hukumnya melihat situasi dan kondisi di lapangan. Tidak harus mengikuti ketetapan yang ada dalam buku Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 178.

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 179.

#### **4. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Sebagian ulama dan hakim agama telah mengetahui keberadaan Kompilasi Hukum Islam dan telah menerapkannya dalam pegangan dalam penetapan hukum, terutama dalam masalah waris. Namun sebagian masyarakat lainnya (kalangan pondok pesantren) belum mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana buktinya karena belum pernah diperlihatkan apalagi disosialisasikan. Menurut ketua Pengadilan Agama kota Medan mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam boleh sebagai referensi, tetapi jangan dipaksakan kepada hakim agama dalam menerapkan hukum di lapangan, harus mengikuti Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya bahwa beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah waris perlu direvisi. Sebaiknya para Hakim Agama diberi kelonggaran untuk berijtihad dalam memutuskan perkara sesuai dengan situasi dilapangan.

#### **5. Masalah Ahli Waris Beda Agama**

Menurut Hakim Agama Kota Medan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan tentang ahli waris beda agama. Konsep dasar hukum wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dapat memperoleh harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah tersebut dilakukan oleh penguasa. Dalam hal ini hakim melalui lembaga peradilan agama. Namun demikian ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris Muslim, karena terhalang untuk saling mewarisi disebabkan perbedaan agama. Mengenai ahli waris non-Muslim, dalam hukum kewarisan dan wasiat wajibah, keduanya berkaitan dengan peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain. Dalam hukum kewarisan, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab (keturunan) atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam. Dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Akan tetapi disebabkan sesuatu hal atau keadaan tidak berhak atau terhalang menerima harta peninggalan dengan jalan warisan.

Dasar penetapan hukum Mahkamah Agung RI, dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 tentang ahli waris non-Muslim mendapatkan harta peninggalan dari pewaris Muslim melalui wasiat wajibah adalah mengadopsi pemikiran dan pendapat ahli hukum (fuqaha) Ibnu Hazm. Penerapan dan pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah merupakan pembentukan hukum baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Mahkamah Agung dalam menetapkan telah memilih salah satu pendapat ulama yang tertuang dalam kitab Fikih. Kebijakan ini nampaknya relevan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan serta kultur umat Islam Indonesia yang majemuk.<sup>123</sup>

#### **6. Masalah Waris Bagi Pembunuhan Dan Fitnah**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 dinyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

---

<sup>123</sup> Badan Litbang dan Diklat, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, h. 183.

dipersalahkan dengan cara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menurut sebagian ulama yang ada di kota Medan mengatakan bahwa percobaan pembunuhan masih dikategorikan mendapatkan warisan asalkan dimaafkan oleh orang yang mau dibunuh, karena baru rencana, belum terjadi dan bisa saja orang tersebut menyesal atas rencananya itu.<sup>124</sup>

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan bahwasanya di dalam Kompilasi Hukum Islam seorang terhalang mendapatkan warisan berbeda dengan yang telah dirumuskan dalam kitab Fikih, perbedaan ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sebab yang terjadi mengapa di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih berbeda ketika menetapkan seseorang menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan.

Karena sama kita ketahui bahwasanya Kompilasi Hukum Islam tersebut ketika dirumuskan menjadi kumpulan hukum Islam berskala nasional rujukannya adalah kepada Al Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab Fikih yang telah dirumuskan para ulama-ulama terdahulu.

Oleh karena itu penulis akan memaparkan dalam penulisan tesis ini beberapa pandangan ulama kota medan. Disini penulis membuat suatu batasan para ulama yang berdomisili di kota Medan. Kemudian para ulama yang benar-benar ahli di dalam dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga mereka yang ikut andil dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam ini. Kemudian penulis memilih kota Medan karena penulis berdomisili di kota Binjai yang berdekatan dengan kota Medan Sumatera Utara dan juga penulis tahu di kota medan ini banyak ulama yang benar-benar berkompeten dalam masalah ini dan juga mereka bisa menjadi narasumber buat penulis.

Dimana nantinya penulis bisa mendapatkan informasi yang akurat dan jelas tentang masalah yang terjadi di dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan masalah yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang mendapatkan warisan, serta perbedaannya dengan Fikih.

Ada enam orang ulama yang penulis wawancarai, dimana keenam ulama ini adalah orang yang memang benar-benar memahami KHI. Adapun keenam ulama tersebut adalah:

- Bapak M. NIZAR SYARIF : Beliau adalah Ketua bidang fatwa Majelis Ulama Kota Medan. Dan Mantan Ketua Al-Washliyah Sumatera Utara.

Menurut beliau ketika penulis mewawancarai pada tanggal 14 Februari 2014 bahwasanya penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah karena melihat dari segala aspek, baik yuridis, sosiologis dan filosofis. Beliau mengatakan bahwasanya mengapa didalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Fikih dalam Masalah seseorang mendapatkan warisan, dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan penghalang seseorang mendapatkan warisan hanya dua yaitu:

---

<sup>124</sup> *Ibid*, h. 184.

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kemudian menganiaya berat pewaris beliau mengatakan seseorang yang menganiaya berat pewaris sama dengan membunuh si pewaris walaupun dia tidak meninggal dunia. Menganiaya berat di sini merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan kejam. Perbuatan menganiaya berat dapat membuat seseorang hilang nyawanya. Kalaupun tidak membuat seseorang hilang nyawanya bisa membuat seseorang menjadi cacat fisiknya seumur hidup dan mungkin dapat berpengaruh kepada mental seseorang. Dia akan mengalami trauma yang berat seumur hidupnya akibat penganiayaan berat dari ahli warisnya.

[illegible]

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (al- Maidah : 32)

[illegible]

mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.”( al-Baqarah: 191).

[illegible]

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.

Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah : 217).

Sudah jelas di dalam Al Qur'an bahaya yang ditimbulkan akibat fitnah tersebut. Karena fitnah bukan hanya bisa merusak pribadi seseorang tetapi juga dapat menghilangkan nyawanya. Bukan itu saja fitnah dapat menghancurkan masyarakat dan juga suatu negara. Oleh sebab itu para ahli dalam Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam salah satu poin seseorang terhalang mendapatkan warisan, karena akibat yang ditimbulkan dari fitnah ini sangat luar biasa dan berakibat fatal.<sup>125</sup>

- Selanjutnya menurut Bapak PAGAR : Beliau adalah salah seorang pengurus ormas Islam tersebar di Medan yaitu Nahdhatul Ulama. Dan beliau menjadi Dewan Syuro Nahdhatul Ulama serta salah seorang anggota komisi fatwa di Majelis Ulama Kota Medan dan Sumatera Utara. Penulis mewawancarai beliau pada tanggal 25- Februari-2014.

Beliau mengatakan bahwa penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Fikih, karena melihat perkembangan zaman sekarang ini dimana di dalam Fikih disebutkan salah satu penghalang mendapatkan warisan adalah perbudakan, beliau mengatakan di zaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi makanya tidak dimasukkan dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian murtad mengapa tidak termasuk di dalam pasal 173 tentang penghalang mendapatkan warisan. Beliau mengatakan murtad atau berbeda agama, sudah di jelaskan pada pasal 171 pada poin (c) yaitu:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Kemudian membunuh sudah jelas seseorang terhalang mendapatkan warisan. Kemudian mencoba membunuh adalah untuk mempercepat seseorang untuk mendapatkan warisan walaupun tidak sampai meninggal dunia tetapi dia sudah berusaha untuk membunuh si pewaris. kemudian menganiaya berat sebenarnya sama dengan membunuh atau mencoba membunuh karena beliau mengatakan itu di analogikan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang karena dia sudah berusaha mempercepat untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu dia melakukan

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis Dengan Bapak M. Nizar Syarif pada tanggal 2 dan 14 – Februari- 2014. Beliau adalah Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Kota Medan dan Mantan Ketua Al-Washliyah Provinsi Sumatera Utara.



penganiayaan berat agar si pewaris dapat segera meninggal dunia dan dia akan segera mendapatkan warisan.<sup>126</sup>

- Kemudian menurut Bapak ALI MURTADHA : Beliau adalah Ketua Komisi Informasi dalam dan Luar Negeri Majelis Ulama Kota Medan dan juga Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara. Beliau yang penulis mewawancarai pada tanggal 11- Maret- 2014. Mengatakan bahwa penghalang seseorang mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Fikih karena melihat kondisi di zaman sekarang ini. Ketika seseorang membunuh si pewaris maka ia tidak berhak mendapatkn warisan, kemudian apabila dia mencoba membunuh walaupun tidak menghilangkan nyawa si pewaris. Tetapi dia sudah berniat dan berusaha untuk membunuh si pewaris guna ingin mendapatkan hartanya. Kemudian beliau mengatakan tentang fitnah yang menjadi penyebab seseorang terhalang mendapatkan warisan, lalu menganiaya berat pewaris menurut beliau sama dengan membunuh karena perbuatan aniaya berat bisa berakibat hilangnya nyawa seseorang. Kalaupun tidak meninggal, maka seseorang bisa cacat fisiknya seumur hidup dan juga berakibat mental seseorang bisa rusak dan akan mengalami trauma yang berkepanjangan.

Lalu pada Fitnah yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam beliau mengatakan bahwasanya fitnah disini bersifat temporer (berkala). Artinya seseorang ketika memfitnah maka dia secara tidak langsung membunuh si pewaris secara pelan- pelan. Kemudian fitnah juga dapat membuat si pewaris hancur nama baiknya dan juga mendapat hukuman penjara karena fitnah yang di sampaikan kepadanya. Oleh karena itu di dalam kompilasi hukum Islam hanya ada dua (2) poin yang dinyatakan dalam pasal 173 tersebut, karena bahaya yang ditimbulkan dari kedua poin tersebut sangat besar akibat yang ditimbulkannya. Kemudian menurut beliau mengapa tidak dimasukkan salah satu penghalang mewarisi yaitu perbedaan agama (murtad), karena pada waktu merumuskan Kompilasi Hukum Islam ada orang-orang yang ikut di dalamnya berfaham liberal. Jadi mereka tidak memasukkan perbedaan agama di dalam pasal 173 tersebut. Kemudian ketika masyarakat membawa permasalahan ini ke pengadilan maka oleh pengadilan di putuskan masalah kewarisan ini dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi apabila masyarakat tidak membawa permasalahan ini ke pengadilan, hanya melalui musyawarah, maka diputuskan berdasarkan yang ada di dalam Fikih. Disinilah perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih.<sup>127</sup>

- Sedangkan menurut Bapak IHSAN ASRI, MA. Seorang ulama kota Medan mengatakan tidak sependapat dengan rumusan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan beliau adalah karena bertentangan dengan hukum Fikih klasik. Kemudian yang kedua beliau hanya percaya pada ulama-ulama terdahulu yang mereka menetapkan suatu hukum dengan sangat berhati-hati sekali. Beliau juga mengatakan para ulama-ulama terdahulu mereka menetapkan suatu hukum tidak hanya sekedar mengeluarkan saja pendapat mereka. Tetapi mereka lebih dahulu melaksanakan ibadah seperti sholat sunat tahajjud, istikharah, dan berzikir kepada Allah minta

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pagar pada tanggal 25 – Februari- 2014. Beliau adalah salah satu pengurus ormas besar Islam yaitu Nahdhatul Ulama dan menjadi Dewan Syuro Nahdhatul Ulama dan juga Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara.

<sup>127</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Murtadha pada tanggal 11 – Maret – 2014. Beliau adalah ketua Informasi Dalam dan Luar Negeri dan Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara.

petunjuk kepada-Nya. Dan tidak itu saja mereka mengkaji secara mendalam tafsir-tafsir Al Qur'an tidak hanya satu atau dua saja melainkan mereka mengkaji semua tafsir yang di tulis atau disampaikan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian dari sisi Ijma' ulama- ulama dahulu tidak terfokus hanya di satu Negara saja akan tetapi di beberapa Negara. Lalu mereka sangat berhati hati dalam mengemukakan pendapat yang telah mereka sampaikan. Kemudian mereka juga meneliti hadis-hadis baik dari sanad matan dan akhlak dari para penyampai hadis yang kemungkinan cacat atau lemah ingatannya.

Kemudian berbeda dengan ulama di zaman sekarang ini menurut beliau mereka sekarang ini kurang mantap dan tidak berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum. kemudian masalah data atau sumber-sumber tidak lengkap.<sup>128</sup>

Menurut beliau seharusnya dalam menetapkan hukum harus jelas dan sumber-sumbernya yang lengkap dan akurat. Tidak serta merta berdasarkan logika dan perasaan semata. Karena dalam menetapkan hukum Islam tidak bisa hanya berdasarkan logika dan perasaan saja.

- Menurut Bapak LEGIMEN SYUKRI, beliau mengatakan bahwasanya penghalang mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Beliau juga mengatakan dalam merumuskan masalah yang ada di KHI tersebut sudah di musyawarahkan oleh para ulama Indonesia dari sabang sampai merauke. Kemudian dengan adanya KHI ini bisa menyatukan semua pendapat yang berbeda-beda karena banyak orang Islam Di Indonesia ini berbeda pendapat atau mazhab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan adanya KHI ini dapat membantu umat Islam Indonesia dalam mencari keadilan untuk permasalahan yang dihadapinya, khususnya dalam masalah harta warisan. Dan ketika permasalahan tersebut di bawa ke Pengadilan Agama maka akan diputuskan sesuai yang telah di rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian didalam KHI mengapa tidak dimasukkan perbudakan dan berbeda agama, karena perbudakan dalam saat tidak ada lagi, akan tetapi dalam realitanya cara-cara perbudakan ini tetap ada, misalnya penindasan, penganiayaan dan sebagainya. Ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Beliau memberikan contoh pada TKI yang berada di Arab Saudi. Mereka menganggap TKI itu adalah sama dengan budak, yang mereka bebas memperlakukan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu maka di dalam salah satu poin (a) di rumuskan yaitu menganiaya berat pewaris. kemudian masalah perbedaan agama karena melihat kondisi bangsa Indonesia yakni walaupun misalnya seorang ayah keluar dari dari Islam sedangkan anaknya tidak, maka akan dikatakan anak tersebut anak dari ayah yang keluar dari Islam. Begitu juga sebaliknya seorang anak yang keluar dari Islam dan ayahnya tidak, tetap akan dikatakan anak tersebut adalah anak dari ayah tersebut walaupun sudah berbeda agama. Kemudian

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak IHSAN ASRI, MA. Pada tanggal 24 – Maret – 2014. Beliau adalah anggota komisi fatwa Majelis Ulama kota Medan bidang pendidikan. Dan juga anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

mencoba membunuh si pewaris walaupun tidak menghilangkan nyawa nya tetapi berakibat cacat seumur hidup ini juga bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan.<sup>129</sup>

Kemudian menurut beliau juga KHI berbeda dengan Fikih klasik karena KHI disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Ketika permasalahan-permasalahan yang timbul di Indonesia mungkin berbeda dengan negara yang lain. kemudian dari segi mazhab yang di anut bangsa Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i. ada juga sebagian yang bermazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Oleh karena itu Pemerintah khususnya Kementrian Agama waktu itu berwenang tentang masalah ini, mencoba mencari solusi guna mengatasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Kemudian dirumuskanlah KHI yang mana telah di telaah dengan cermat baik dari segi sosiologis, filosofis dan manfaat yang dirasakan serta keadilan yang akan di terima masyarakat Islam di Indonesia.

- Menurut Bapak HASAN MANSUR, Beliau mengatakan bahwasanya penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam KHI, jika si pewaris telah meninggal dunia itu tidak ada permasalahan lagi, karena pembagian harta warisan itu secepatnya dibagi-bagi kepada ahli warisnya jangan ditunda-tunda sebab akan menimbulkan perkelahian sampai kepada pembunuhan. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah ketika si pewaris belum meninggal dunia, kemudian ahli waris tadi membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat serta memfitnah si pewaris, akibat perbuatannya itu maka si pewaris meninggal dunia, maka dalam hal ini ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi jika harta warisan itu telah dibagi-bagi sebelum si pewaris meninggal maka ahli waris tetap mendapat warisan. Atau si pewaris meninggal diakibatkan perbuatan ahli waris sesudah harta dibagi-bagikan maka dia akan tetap mendapatkan harta warisan. Kemudian masalah perbedaan agama, jika dahulunya ahli waris beragam Islam kemudian dia keluar (murtad), sebelum si pewaris meninggal dunia dan harta belum dibagi-bagi maka dia tidak mendapatkan warisan, dan jika ahli waris dahulunya beragama Islam kemudian dia keluar dari Islam, sedangkan pada waktu itu dia

masih beragama Islam ketika si pewaris meninggal dunia maka dia tetap berhak mendapatkan warisan.<sup>130</sup>

Memang kata beliau masalah harta warisan ini sangat sensitif sekali, hanya gara-gara harta seorang tega membunuh orang tuanya atau saudaranya. Supaya dia bisa cepat mendapatkan harta warisan. kemudian juga seseorang tidak segan-segan memfitnah dan menganiaya berat si pewaris hingga meninggal dunia. Kalaupun tidak meninggal dunia, menyebabkan si pewaris cacat seumur hidup. Dalam kondisi seperti ini dapat mempercepat proses si pewaris hilang nyawanya.

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak LEGIMEN SYUKRI, Pada tanggal 24 – Maret – 2014. Beliau adalah seorang ulama kota Medan dan juga anggota komisi fatwa Majelis Ulama Kota Medan bidang pendidikan, dan juga Sekretaris Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

<sup>130</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Mansur, Pada tanggal 24 – Maret – 2014. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Bidang Pendidikan.

Ada hal-hal yang kita baca di dalam Fikih tidak ditemukan di dalam KHI. Hal ini mengingat karena kondisi saat ini yang tidak sama dengan kondisi zaman dahulu. Kemudian yang terjadi di Indonesia bisa menuntut seseorang bisa berbeda dengan apa yang telah dirumuskan para ulama-ulama terdahulu. Misalnya di dalam KHI disebutkan penghalang seseorang mendapatkan warisan yaitu menganiaya berat dan memfitnah. Ini jelas bertentangan dengan yang telah di rumuskan di dalam kitab-kitab Fikih. Kemudian tidak dicantumkannya berbeda agama atau murtad. Apakah KHI ini sudah menyimpang dari Fikih yang telah dirumuskan oleh para fuqaha' terdahulu. Inilah yang menjadi polemik yang timbul dalam masyarakat Islam Indonesia. Kemudian di dalam Fikih di sebutkan para ulama memasukkan penghalang mewarisi yaitu berlainan negara.

Yang dimaksud disini adalah negara merupakan sebuah wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara sendiri, dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan negara asing. Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila diantara ahli waris dan si pewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang telah di sebutkan di muka, apabila dua negara sama-sama Muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi. Kemudian dalam KHI hanya disebutkan dua poin saja, itupun di sebutkan salah satu penghalang mendapatkan warisan adalah memfitnah. Ini jelas bertentangan dengan Fikih. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para ulama yang berdomisili di kota Medan penulis sangat tertarik dengan alasan-alasan yang di kemukakan oleh para ulama tersebut. Hal ini di karenakan perbedaan antara KHI dengan fikih dimana sama di ketahui salah satu rujukan KHI in adalah kitab-kitab Fikih klasik. Banyak yang penulis dapat resapi dan fahami yang mungkin selama ini penulis tidak ketahui.

Adapun yang pertama perbedaan KHI dengan Fikih bisa terjadi disebabkan karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak bisa lagi di samakan dengan masa dahulu, mengingat semakin canggihnya teknologi dan kecendrungan hidup sekarang ini lebih kepada kehidupan dunia yang terlalu dicintai. Oleh karena itu bisa menyebabkan seseorang gelap mata dan memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga mudah berbuat keji dan munkar. Akibatnya menimbulkan permusuhan, perkelahian, hingga pembunuhan.

Oleh karena itu melihat kondisi saat ini yang dituntut untuk membuat suatu terobosan baru di bidang hukum Islam. Yang nantinya akan bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Dan bisa memberi rasa keadilan kepada mereka. Maka untuk hal itu pemerintah membuat suatu badan yang melibatkan para ulama, pakar hukum seluruh Indonesia guna membuat terobosan baru tersebut. Setelah memakan waktu yang tidak sebentar disepakatilah suatu hukum Islam yang sesuai dengan kondisi saat ini dan juga sesuai dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini merupakan Ijtihad para ulama Indonesia yang nantinya bisa di tetapkan sebagai dasar hukum untuk menetapkan permasalahan yang terjadi di dalam Pengadilan Agama. Sebenarnya para ulama kita berharap KHI ini bukan hanya menjadi rujukan Hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan masalah yang terjadi dalam persengketaan harta warisan, akan tetapi KHI ini bisa di buat menjadi Undang-Undang dasar Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim ini.

Ini juga dapat menjadi pembantu masyarakat Islam Indonesia ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat di mana banyak terjadi kesewenang-wenangan akibat

memperturutkan hawa nafsunya. KHI ini dapat memberikan solusi bagi mereka yang ingin mendapat keadilan dari perbuatan zalim saudaranya atau orang lain.

Kemudian perbedaan kedua adalah KHI sebagai kumpulan hukum Islam yang telah resmi di sahkan oleh pemerintah bisa menjadi suatu ketetapan yang dipegang oleh hakim Pengadilan Agama agar bisa memberikan keadilan kepada masyarakat yang hak-hak mereka di ambil secara paksa dan tidak secara alamiah. Misalnya dengan membunuh atau mencoba membunuh dan sebagainya. Dan juga menganiaya berat pewaris serta memfitnahnya sehingga bisa menyebabkan si pewaris meninggal dunia.

Kemudian perbedaan ketiga adalah KHI sebagai Kumpulan hukum Islam tidak hanya melihat hanya dari satu sisi pendapat saja akan tetapi melihat dari berbagai pendapat yang ada. Kemudian KHI tidak hanya memandang dari satu aspek kehidupan saja, akan tetapi dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek filosofis. Ketiga aspek ini memang harus di lihat karena menyangkut kehidupan banyak orang. Kalau KHI hanya memandang dari satu aspek saja tentu akan menimbulkan kekacauan dan persengketaan karena kurangnya rasa keadilan yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Oleh karena itu pemerintah khususnya sudah mengkaji hal itu secara mendalam guna mencapai keadilan dan kemakmuran di masyarakat khususnya umat Islam Indonesia. Memang diakui minimnya pengetahuan masyarakat tentang KHI ini menyebabkan mereka tidak memahami apa itu KHI dan juga isi dari KHI tersebut. Makanya masyarakat ketika timbul masalah pembagian warisan, mereka tidak membawa masalah itu ke Pengadilan Agama, akan tetapi mereka menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak sedikit yang kita ketahui timbul masalah ketika penyelesaian dengan kekeluargaan ini menimbulkan perselisihan dan percekocokan. Karena masing-masing ahli waris ingin bagian ia dapatkan harus lebih dari yang lain. Atau sebaliknya ia ingin menguasai semua harta peninggalan orang tuanya.

Kalau hal ini terjadi maka perlu suatu acuan yang jelas guna menghilangkan persengketaan dan percekocokan tadi. Karena itu bisa membuat seseorang tidak dapat berlaku semena-mena terhadap orang lain. Karena kalau hal itu terjadi dia harus berhadapan dengan hukum. dan akibatnya ia akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Perbedaan KHI dengan Fikih yang keempat adalah kalau fikih yang telah di rumuskan para ulama ataupun mujtahid terdahulu, hanya mungkin melihat kondisi pada waktu itu, tidak melihat kondisi di masa yang akan datang. Oleh karena dalam salah satu sumber hukum Islam adalah ijma' para ulama setelah Al Qur'an dan Sunnah. Ijma' dalam pengertian adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa yang berbeda. Kalau Fikih klasik itu memang hasil ijtihad ulama terdahulu yang terjadi pada masanya. Lalu bagaimana masalah yang timbul di zaman sekarang ini. Tentu berbeda dengan yang terjadi di zaman dahulu. kalau kita mengkaji kitab-kitab Fikih klasik mungkin banyak tidak jumpai membahas masalah-masalah yang terjadi di masa sekarang ini. Misalnya bayi tabung, pencangkokan jantung, bunga bank dan lain-lain. Hal ini tentu memerlukan penetapan hukum supaya tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Oleh karena itu para ulama Indonesia berkumpul untuk bermusyawarah guna menetapkan hukum tentang permasalahan ini agar tidak membuat bingung dan dan tidak tenang dalam kehidupannya. Oleh karena itu KHI adalah merupakan jawaban yang di

buat pemerintah agar tidak terjadi kekacauan dimasyarakat. Dan KHI ini merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia setelah mengkaji, meneliti dan menelaah dari berbagai aspek dalam kehidupan.

Perbedaan KHI dengan Fikih yang kelima adalah Fikih yang kita pahami adalah kitab yang memberikan penetapan hukum dalam masalah yang terjadi di dalam kehidupan baik itu ibadah maupun muamalat. Dan juga di jelaskan cara beribadah dan bermuamalat yang sesuai dengan tuntutan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Akan tetapi Fikih yang kita pahami hanya bersifat umum saja tidak secara khusus membahas tentang sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Memang di era tujuh puluhan ada keinginan para ulama ingin membuat suatu rumusan Fikih yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Karena bisa terjadi di dalam suatu negeri berbeda kehidupan masyarakatnya dengan negeri yang lain. Misalnya negara Indonesia berbeda kehidupannya dengan Arab Saudi, Mesir berbeda dengan Amerika dan lain-lain sebagainya. Tentu disini perlu di buat suatu rumusan hukum yang bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di negeri tersebut. Kalau dipaksakan suatu negeri yang berbeda cara dan budayanya harus mengikuti cara budaya negeri yang lain, maka akan timbul kekacauan dan perpecahan. Ini tidak lagi sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil'alam.

Maka dengan Kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain perlu di buat suatu ketetapan hukum yang di dalamnya telah dirumuskan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Ini akan menjadi aturan yang mengikat dan dapat di terapkan di dalam masyarakat Indonesia. Peraturan yang mengikat dan menjadi acuan guna menetapkan hukum dalam permasalahan yang terjadi. Dan perbedaan dengan Fikih bukan berarti keluar dari ketetapan Al Qur'an dan Hadis. Akan tetapi tetap berpedoman kepada sumber-sumber hukum Islam yang telah di rumuskan para ulama terdahulu, hanya perbedaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun masalah yang terjadi tetap memperhatikan keadaan atau kondisi dari masyarakat tersebut. Demikian juga masalah warisan, di Indonesia banyak di jumpai agama dan adat istiadat yang berbeda. Ini yang menyebabkan bangsa Indonesia harus membuat suatu kumpulan hukum yang bisa di terima segenap masyarakat yang berbeda adat istiadatnya. Dan membuat bangsa Indonesia memahami pentingnya kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Dan tidak memaksakan kehendaknya dan adat istiadatnya kepada orang lain khusus dalam permasalahan warisan ini.

Di dalam adat istiadat ada diatur tentang masalah pembagian harta warisan. Bisa jadi adat yang satu berbeda dengan adat yang lain. Misalnya suku Batak berbeda dengan suku padang cara pembagian warisan, dan suku jawa berbeda dengan suku banjar dan lain sebagainya. Dalam hal ini KHI sebagai kumpulan Hukum Islam sudah melihat hal itu. Perbedaan pembagian harta warisan yang berbeda suku dan adat istiadatnya telah membuat pemerintah perlu merumuskan suatu ketetapan yang bisa mengambil dan memberi jalan tengah diantara suku dan adat istiadat yang berbeda di Indonesia. Agar tidak menimbulkan perpecahan terhadap masyarakat disebabkan perbedaan suku dan adat istiadat tersebut. Oleh karena itu KHI ini merupakan penyelamat bagi umat Islam di Indonesia yang dapat membuat rasa keadilan bagi mereka. Karena perbedaan KHI dan Fikih bukan menjadi suatu hal yang merugikan seseorang, tetapi akan memberikan keuntungan. Karena KHI merupakan solusi yang terbaik guna memberikan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Oleh karena itu bagi masyarakat Islam Indonesia hendaklah dapat memahami pentingnya KHI ini dan juga juga memahami isi dari KHI itu sendiri supaya tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dan prasangka yang buruk terhadap pemerintah yang memegang andil dalam perumusan masalah KHI tersebut. Dan oleh karena itu mulailah

secara perlahan-lahan kembali kepada KHI dalam memutuskan suatu perkara baik itu tentang perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf dan wasiat. Dan lain sebagainya. Jangan lagi menggunakan sistem adat atau kekeluargaan yang akan menimbulkan pertentangan dan permusuhan dan bisa mengakibatkan pembunuhan. Jika di putuskan dengan merujuk kepada KHI dan ada timbul pertentangan serta mengakibatkan pembunuhan, maka ada sanksi yang diterima oleh ahli waris yang berbuat semena-mena terhadap si pewaris. Karena sudah ada diatur dalam KHI tersebut.

Dan juga pemerintah dalam hal ini juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan KHI ini kepada masyarakat Islam Indonesia, supaya masyarakat bisa tahu dan paham tentang KHI dan tujuan KHI tersebut serta pentingnya KHI dalam memecahkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak masyarakat kita yang tidak tahu apa itu KHI dan apa isinya dan untuk apa di buat. Dan bagaimana KHI itu memberikan ketetapan hukum dalam masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Serta kemana nantinya masyarakat mengadu untuk meminta ketetapan hukum tentang permasalahan yang di hadapinya. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat seminar atau diskusi dan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta masyarakat umum langsung guna mensosialisasikan KHI ini kepada mereka. Hal ini bisa berdampak positif bagi mereka agar lebih mengetahui dan paham bagaimana sebenarnya KHI dan apa isinya serta tujuan di buatnya KHI di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi tersebut juga bisa memudahkan para hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan suatu hukum yang bisa memberikan rasa keadilan tanpa adanya sikap rasa benci dan dendam terhadap orang lain karena merasa di lakukan tidak adil. Karena selama ini minimnya pengetahuan masyarakat tentang KHI ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam hal mensosialisasikan kepada mereka. Dalam hal ini bisa berakibat timbulnya permusuhan dan pembunuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu perlu kiranya kepada segenap lapisan masyarakat khususnya yang beragama Islam hendaknya dapat berperan aktif serta tetap menjalankan aturan yang ada khususnya yang terdapat didalam KHI ini agar bisa terlaksananya kehidupan yang adil dan makmur serta penuh dengan berkah dan maghfirah dari Allah SWT. Karena kita telah menegakkan hukum-hukum Allah di negara kita ini terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hal ini bisa terealisasi dengan baik bisa jadi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat mengetahui hak-hak dan mereka tanpa merampas hak-hak orang lain. Dalam pembagian warisan pun seseorang dapat mengetahui bagian-bagian yang ia peroleh tanpa mengambil bagian yang menjadi hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Karena sudah mengetahui bahwa itu adalah hukum dari Allah yang telah ditetapkannya dalam Al Qur'an maupun yang juga telah DIA tetapkan melalui Hadis Rasulullah Saw.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Didalam KHI bahwasanya penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan adalah: apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kemudian penghalang mendapatkan warisan menurut para ulama Fikih adalah :

- a. Perbudakan
- b. Pembunuhan
- c. Berbeda agama atau murtad
- d. Berlainan Negara.

Selanjutnya penghalang seseorang mendapatkan warisan dalam KHI menurut pandangan ulama kota Medan adalah:

- a. Setelah melihat dan menelaah kondisi bangsa Indonesia saat ini yang tidak sama dengan bangsa lain, karena itu maka dibuatlah suatu rumusan hukum yang dinamakan KHI. Didalamnya



membahas masalah perkawinan, kewarisan maupun wakaf. Kemudian KHI ini di rumuskan tidak hanya memandang dari satu aspek saja, melainkan melalui berbagai aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.

- b. Kompilasi Hukum Islam tidak dirumuskan dengan hanya mengambil satu atau dua pendapat ulama, akan tetapi beberapa ulama se Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu mereka di kumpulkan untuk merumuskan KHI ini.
- c. Melihat betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan karena perbuatan menganiaya berat dan memfitnah, maka di buatlah di dalam KHI pada pasal 173 tentang penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan adalah menganiaya berat dan memfitnah.
- d. Dirumuskannya penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam KHI dapat membantu masyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan dalam hal pembagian harta warisan.

## **B. Saran-saran**

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaklah dalam pembagian harta warisan itu didahului dengan memperhitungkan terlebih dahulu muwaris kepada anggota keluarganya karena dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris.
2. Kalau ada dari ahli waris yang bersengketa dalam hal pembagian warisan, hendaklah diselesaikan secara damai melalui cara kekeluargaan, walaupun tidak bisa melalui Pengadilan Agama serta instansi-instansi yang berwenang.

3. Pihak pengadilan dan khususnya pemerintah yang menangani masalah tersebut, haruslah bertindak adil dan tegas dalam memutuskan setiap perkara serta menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya tanpa memihak antara satu pihak dengan pihak lainnya dan juga harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan dari sipewaris karena hanya sedikit sekali masyarakat Islam Indonesia ini yang tahu Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Al- Nawawi, *Al- Majmu'* Juz XVII.

\_\_\_\_\_, *Syarah Sahih Muslim*, Juz XI.

Abdurrahim, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfatu Al- Ahwadzii*, Juz V. Kairo : Al- Maktabah Al- Taufiqiyyah, t.th.

Al- Adzim Abadii, *Aunu Al- Ma'buud*. Juz V.

Al- Bukhari, *Kitab Faraid*. Beirut : Libanon, 1992.

Al- Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al- Mughni*, Juz VIII. Kairo : Daar Al- Hadis, 1425/ 2004.

Abdul Manan, dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Peradilan Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani, 1979.

Al- Kahlani, Muhammad Ibn Ismail. *Subul Al Salam*, Juz III t.t : Dahlan, t.th.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung : CitaPustaka Media Perintis, 2010.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Pressindo, 1992.

As'ad, Aliy. *Fathul Muin*. Yokyakarta : Pustaka Tarbiyah, 1979.

Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Keagungan dan Keindahan syari'at Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.

As- Suyuti, Jalal Ad-Din, *Al- Asybah wa An- Naza'ir Fi Al- Furu'* Cet I. Syirkah AsySyaqafah, 1965.

Al- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al- Maraghi 2*. Semarang : Toha Putra, 1984.

As- Shiddieqy, Hasbi. *Fikihul Mawaris*. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al- Bayyan I*. Bandung : Al- Ma'arif, 1966.

As- Sayis, Ali, Syaltout, Mahmoud. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*. Jakarta Bulan Bintang, 1973.

Blogspot.com Hukum Pidana.html.

Budiono, Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya bakti, 1999.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Juz I, Cet. I Mesir : Mustafa Al- Babi Al- Halabi, 1952.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Gema Risalah Press, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

---

\_\_\_\_\_, *Kamus Besar*. Jakarta : Balai Pustaka, 1980.

Drajat, Zakiah. *Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz. *Eksklopedi Hukum Islam*, Cet. IV. Jakarta : Baru Van Hoeve, 2001.

*Eksiklopedi Islam* jilid 2 Van Hoeve, Jakarta: PT. Khitian Baru, 1999.

El- Awa, Mohamed S. *Hukuman Dalam Undang-Undang Islam*. Kuala Lumpur, 1999.

Fethullah, Gulen. *Versi Terdalam Kehidupan Rasullah Muhammad Saw*. Jakarta : Raja Grafindo, 2002.

Fury, Mubarak. Rahman, Shafiyyur. *Sirah An-Nabawiyah* Cet IX. Jakarta : Al-Kautsar, 2000.

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama RI.

Jaiz, Hartono Ahmad. *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*. Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2004.

Kementrian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta : 2012.

Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008.

Mughniyah, Muhammad jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera, 2008.

- Mansur, Al- Halim. *Al- Mu'jam Al- Wasit*, Juz I, Cet II Mesir : Dar Al- Ma'rifah, 1972.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Juz I, Bandung : Dahlan, 1968.
- Mujieb, M. Abdul. AM, Mabruri Tholhah. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Mudjib, Abdul. *Al- Qawa'idul Fikihiyyah*. Yokyakarta : Nurcahaya, 1980.
- Maruzi, Muslim. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang : Mujahidin, 1989.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan : IAIN Press, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan : Perdana Mulya Sarana, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Bandung : Citapustaka Media, 2007.
- Poerdaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. XIII, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1993.
- Rafiq, Ali. *Fikih Mawaris*. Cet. Ke- 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Simanjuntak, Komis. Dan Suhrawadi, Lubis. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, 2001.
- Syarbaini, Syaikh Muhammad Khatib. *Mugnil Muhtaj*. Juz I. t.t. : Dar al- Fikr, at Toba'at wa an-Nasyr wa taujih, 1978 M / 1398 H.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendesi Keadilan Hukum Waris Islam Transform* Jakarta : PT. Raja Gradindo Persada, 1996.
- Saurah, Abi Isa. *Sunan At- Tirmizi*, Juz III. Beirut Lebanon : Muassasah Ar- Risalah, t.th.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Taqiuddin , *Kifaya Al Akhyar*, Juz II, Bandung , Indonesia : Dar Ihya Al- Kutub t.th,

Yahya, Taufik, Djakfar, Idris. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.

Zahrah, Muhammad Abu. *Hukum waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta : Lentera Basritama, 2001.

Zuhaili, Wahbah, *Fikih Al Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII Dar Al Fikr, 1398 H / 1978 M.